

INFOGRAFIS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

Papua Bangkit, Mandiri, Dan Sejahtera Yang Berkeadilan



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Patut kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Penyertaan-Nya sehingga Laporan "Infografis Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2020" dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas yang berkesinambungan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Papua. Selain menyajikan analisis statistik secara historis mengenai hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah Provinsi Papua, laporan ini juga memuat tantangan dan gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah dimasa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan penyusunan rencana kerja tahunan daerah Provinsi Papua Tahun 2021/2022.

Tersusunnya laporam ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yaitu seluruh OPD lingkup Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua, serta Tim Tenaga Ahli Pusat KEUDA UNCEN, yang telah banyak memberi dukungan dan masukan terkait dengan data dan informasi untuk analisis kerangka pembangunan daerah Provinsi Papua yang diperlukan. Untuk itu diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersebut.

Walaupun laporan ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya namun sangat disadari masih terdapat kekurangan didalamnya, sehingga kontribusi pemikiran yang edukatif dan konstruktif untuk perbaikan kedepan sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan dampak positif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Jayapura, Desember 2020 Kepala Bappeda Provinsi Papua,



DAFTAR ISI

	Па	amar
Kata Penganta	ar	i
Daftar Isi		ii
Daftar Gamba	r	iv
BAB I KERAN	GKA PEMBANGUNAN	
1.1.	Visi dan Misi Pembangunan Papua 2019-2023	2
1.2.	Kerangka Pembangunan Papua 2019-2023	3
1.3.	Prioritas Pembangunan Papua 2019-2023	4
BAB II ASPE	K KESEJAHT ERAAN MASYARAKAT	
2.1.	Tingkat Kemiskinan	6
2.2.	Kualitas Pembangunan Manusia	6
2.3.	Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi	10
2.4.	Pendapatan Per Kapita dan Distribusi Pendapatan	11
2.5.	Inflasi dan Tingkat Kemahalan Harga	12
2.6.	Penduduk dan Ketenagakerjaan	14
2.7.	Keuangan Daerah	17
2.8.	Kontribusi Sektoral Dalam Perekonomian Wilayah	18
2.9.	Ketahanan Pangan	21
BAB III ASPE	K DAYA SAING DAERAH	
3.1.	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita	24
3.2.	Produktivitas dan Investasi Regional	25
3.3.	Nilai Tukar Petani	26
3.4.	Ekspor Non Migas	27
3.5.	Sektor Perbankan	28
3.6.	Tingkat Kriminalitas	29
3.7.	Rasio Ketergantungan	30
3.8.	Prestasi Papua dalam PON & Persiapan PON XX Papua	31



BAB IV ASPEK PELAYANAN UMUM

	4.1.	Akses Pendidikan	36
	4.2.	Akses Kesehatan	44
	4.3.	Infrastruktur	48
	4.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	50
	4.5.	Kementrian, Ketertiban Umum, & perlindungan Masyarakat	51
	4.6.	Sosial	51
	4.7.	Pemberdyaan Perempuan	53
	4.8.	Lingkungan Hidup	54
	4.9.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56
	4.10.	Pengendalian Penduduk dan KB	57
	4.11.	Koperasi	57
BAB V		ANGAN DAN PROSPEK EKONOMI PROVINSI PAPUA -2022	
	5.1.	Perdagangan Antar Negara	59
	5.2.	Perdagangan Antar Daerah	59
	5.3.	Capital Inflow	61
	5.4.	Indikator Makro Ekonomi Papua 2020	62
	5.5.	Faktor Eksternal dan Internal	64
	5.6.	Proyeksi Ekonomi Papua 2021 dan 2022	65



DAFTAR GAMBAR

	F	lalaman
Gambar 1.1.	Kerangka Pembangunan Papua 2019-2023	. 3
Gambar 1.2.	Keterkaitan Janji/Program Prioritas Dengan Program Operasional Dan Kegiatan	. 4
Gambar 2.1.	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	. 6
Gambar 2.2.	Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	. 6
Gambar 2.3.	Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan Provinsi Papua 2014-2019	. 6
Gambar 2.4.	Kabupaten Dengan Tingkat Kemiskinan Di atas Rata-rata Papua Tahun 2019	. 7
Gambar 2.5.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Papua Tahun 2016-2019	. 7
Gambar 2.6.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2014-2019	. 7
Gambar 2.7.	Angka Harapan Hidup Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	. 8
Gambar 2.8.	Harapan Lama Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	. 8
Gambar 2.9.	Rata-rata Lama Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	. 8
Gambar 2.10.	Pengeluaran Per Kapita Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	. 8
Gambar 2.11.	Penyebaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019	. 9
Gambar 2.12.	Angka Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas Di Provinsi Papua Tahun 2016-2019	. 9
Gambar 2.13.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Dengan Status Gizi Buruk Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018	. 9
Gambar 2.14.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Dengan Status Gizi Baik Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018	. 9
Gambar 2.15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Provinsi Papua 2014-2019	. 10
Gambar 2.16.	Struktur Ekonomi Provinsi Papua Periode 2014-2019	. 10
Gambar 2.17.	Pemusatan Ekonomi Papua Tahun 2019	. 10

Gambar 2.18.	Pendapatan Perkapita ADHK 2010 Provinsi Papua Tahun 2014-2019	11
Gambar 2.19.	Distribusi Pendapatan Di Provinsi Papua Versi Bank Dunia Tahun 2016-2019	11
Gambar 2.20.	Ketimpangan Antar Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	11
Gambar 2.21.	Ketimpangan Antarwilayah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	11
Gambar 2.22.	Inflasi Gabungan 2 Kota Di Provinsi Papua 2015-2019	12
Gambar 2.23.	Inflasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Berdasarkan Rata-rata Deflator 2015-2019	12
Gambar 2.24.	Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	12
Gambar 2.25.	Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2019	13
Gambar 2.26.	Korelasi Antara Indeks Kemahalan Kontruksi dengan Kemiskinan dan IPM Di Papua	13
Gambar 2.27.	Disparitas Harga Beberapa Bahan Pokok Penting Di Papua Tahun 2019/2020	13
Gambar 2.28.	Perkembangan Penduduk Di Provinsi Papua 2015-2019	14
Gambar 2.29.	Komposisi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019	14
Gambar 2.30.	Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2019	14
Gambar 2.31.	Jumlah Orang Bekerja Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	15
Gambar 2.32.	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	15
Gambar 2.33.	Komposisi Tenaga Kerja Provinsi Papua Menurut Pendidikan Tahun 2015-2019	15
Gambar 2.34.	Struktur Tenaga Kerja Provinsi Papua Rata-rata Periode 2015-2019	16
Gambar 2.35.	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2015-2019	16
Gambar 2.36.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Tahun 2019	16
Gambar 2.37.	Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2015-2019	17
Gambar 2.38.	Tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019	17





Gambar 2.39.	Tingkat Ketergantungan Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019	17
Gambar 2.40.	Tingkat Desentralisasi Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019	17
Gambar 2.41.	Tingkat Efektifitas PAD Provinsi Papua Tahun 2015-2019	18
Gambar 2.42.	Tingkat Efisiensi PAD Provinsi Papua Tahun 2015-2019	18
Gambar 2.43.	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	18
Gambar 2.44.	Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultur Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	18
Gambar 2.45.	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	19
Gambar 2.46.	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	19
Gambar 2.47.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	19
Gambar 2.48.	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	19
Gambar 2.49.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	20
Gambar 2.50.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	20
Gambar 2.51.	Kontribusi Sektor Kontruksi Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	20
Gambar 2.52.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	20
Gambar 2.53.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019	21
Gambar 2.54.	Tingkat Produksi Komoditi Penting Bahan Makanan Di Provinsi Papua 2015 dan 2019	21
Gambar 2.55.	Skor PPH Provinsi Papua 2015-2018	22
Gambar 2.56.	Peta dan Indeks Ketahanan Pangan Di Provinsi Papua 2019	22
Gambar 3.1.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Tahun Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	24
Gambar 3.2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Menurut Kelompok Komoditi Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	24



Gambar 3.3.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Tahun Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019	24
Gambar 3.4.	Produktifitas Regional Tenaga Kerja Provinsi Papua Tahun 2015-2019	25
Gambar 3.5.	Realisasi Investasi PMDN dan PMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019	25
Gambar 3.6.	ICOR Provinsi Papua Tahun 2015-2019	25
Gambar 3.7.	Komponen Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Periode 2015-2019	26
Gambar 3.8.	Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Periode 2015-2019	26
Gambar 3.9.	Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Menurut Sub Sektor Tahun 2019	26
Gambar 3.10.	Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2015-2019	27
Gambar 3.11.	Komposisi Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Tahun 2015-2019	27
Gambar 3.12.	Tabel Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Pelabuhan Asal	27
Gambar 3.13.	Nilai Ekspor Bulanan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2018-2020	27
Gambar 3.14.	Jumlah Bank Umum dan BPR Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	28
Gambar 3.15.	Dana Pihak Ketiga, Kredit, Dan Loan To Deposit Ratio Bank Umum Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	28
Gambar 3.16.	Dana Pihak Ketiga, Kredit, Dan Loan To Deposit Ratio Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	28
Gambar 3.17.	Angka Kriminalitas Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	29
Gambar 3.18.	Angka Kriminalitas Yang Tertangani Di Provinsi Papua Tahun 2016-2018	29
Gambar 3.19.	Persentase Korban Kejahatan, Korban Yang Melapor Dan Tidak Melapor Ke Polisi Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018	29
Gambar 3.20.	Depedency Ratio Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	30
Gambar 3.21.	Depedency Ratio Total Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019	30
Gambar 3.22	Prestasi Papua Dalam PON Tahun 1973-2016	31



Gambar 3.23.	Perolehan Medali Provinsi Papua Pada PON XIX Tahun 2016	31
Gambar 3.24.	Brand Identity PON XX Papua	32
Gambar 3.25.	Cabang Olah Raga PON XX Papua	33
Gambar 3.26.	Penyelesaian Pembangunan Arena PON XX Papua Menurut Klaster	33
Gambar 3.27.	Penyebaran Cabor PON XX Papua Menurut Klaster	34
Gambar 3.28.	Jumlah Kontingen PON XX Papua Yang Mendaftar Pada Tahap Pertama 2020	35
Gambar 4.1.	Jumlah Guru & Murid SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019	36
Gambar 4.2.	Jumlah Guru & Murid SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019	36
Gambar 4.3.	Jumlah Guru & Murid SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019	36
Gambar 4.4.	Rasio Guru & Murid SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019	37
Gambar 4.5.	Rasio Guru & Murid SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019	37
Gambar 4.6.	Rasio Guru & Murid SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019	37
Gambar 4.7.	APK SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019	38
Gambar 4.8.	APK SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019	38
Gambar 4.9.	APK SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019	38
Gambar 4.10.	APM SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019	39
Gambar 4.11.	APM SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019	39
Gambar 4.12.	APM SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019	39
Gambar 4.13.	APS 07-12 Provinsi Papua Tahun 2015-2019	40
Gambar 4.14.	APS 13-15 Provinsi Papua Tahun 2015-2019	40
Gambar 4.15.	APS 16-18 Provinsi Papua Tahun 2015-2019	40
Gambar 4.16.	Angka Putus Sekolah SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019	41
Gambar 4.17.	Angka Putus Sekolah SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019	41
Gambar 4.18.	Angka Putus Sekolah SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019	41
Gambar 4.19.	Angka Kelulusan SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019	42
Gambar 4.20.	Angka Kelulusan SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019	42
Gambar 4.21.	Angka Kelulusan SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019	42

Gambar 4.22.	Angka Melanjutkan Sekolah Provinsi Papua Tahun 2015-2018	43
Gambar 4.23.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Provinsi Papua Tahun 2015-2019	43
Gambar 4.24.	Rasio puskesmas per 10.000 penduduk Papua Tahun 2015-2019	44
Gambar 4.25.	Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per 100ribu penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019	44
Gambar 4.26.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Provinsi Papua Tahun 2015-2019	44
Gambar 4.27.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Provinsi Papua Tahun 2015-2019	45
Gambar 4.28.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2019	45
Gambar 4.29.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2019	45
Gambar 4.30.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Provinsi Papua Tahun 2015-2019	46
Gambar 4.31.	Cakupan pelayanan nifas Provinsi Papua Tahun 2015-2019	46
Gambar 4.32.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Provinsi Papua Tahun 2015-2019	46
Gambar 4.33.	Rata Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari (kkal) dan Protein per Kapita per Hari (garam) Provinsi Papua Tahun 2015-2019	47
Gambar 4.34.	Angka penderita Malaria Provinsi Papua Tahun 2015-2019	47
Gambar 4.35.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Provinsi Papua Tahun 2015-2019	47
Gambar 4.36.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Provinsi Papua Tahun 2015-2019	48
Gambar 4.37.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019	48
Gambar 4.38.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Provinsi Papua Tahun 2015-2019	48
Gambar 4.39.	Persentase penduduk berakses air minum Provinsi Papua Tahun 2015-2019	49

Gambar 4.40.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019	49
Gambar 4.41.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Provinsi Papua Tahun 2015-2019	50
Gambar 4.42.	Jumlah rumah layak huni Provinsi Papua Tahun 2015-2019	50
Gambar 4.43.	Jumlah Anggota Linmas Provinsi Papua Tahun 2015-2019	51
Gambar 4.44.	Jumlah Fakir Miskin Provinsi Papua Tahun 2015-2017	51
Gambar 4.45.	Jumlah Anak Terlantar Provinsi Papua Tahun 2015-2017	52
Gambar 4.46.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Provinsi Papua Tahun 2015-2017	52
Gambar 4.47.	Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Papua Tahun 2015-2019	53
Gambar 4.48.	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Papua Tahun 2015-2019	53
Gambar 4.49.	Pertisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Provinsi Papua Tahun 2015-2019	54
Gambar 4.50.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2017	54
Gambar 4.51.	Persentase sampah yang terangkut ke TPA Tahun 2015-2018	55
Gambar 4.52.	Persentase sampah yang tidak terolah Tahun 2015-2018	55
Gambar 4.53.	Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki NIK Provinsi Papua Tahun 2019	56
Gambar 4.54.	Rasio Akseptor KB Provinsi Papua Tahun 2019	57
Gambar 4.55.	Pasangan Usia Subur Ber-KB Aktif dan Tidak Aktif Provinsi Papua Tahun 2019	57
Gambar 4.56.	Persentase Koperasi Aktif Provinsi Papua Tahun 2019	57
Gambar 5.1.	Derajad Keterbukaan Ekonomi Luar Negeri Di Provinsi Papua 2015-2019	59
Gambar 5.2.	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Bulanan y.o.y Provinsi Papua Tahun 2019-2020	59
Gambar 5.3.	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Bulanan m.o.m Provinsi Papua Tahun 2020	59
Gambar 5.4.	Komposisi Ekspor Menurut Negara Tujuan Di Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020	60
Gambar 5.5.	Perkembangan Perdagangan Antaradaerah Provinsi Papua Tahun 2018-2019	60

Gambar 5.6.	Struktur Komoditi Perdagangan Antaradaerah Provinsi Papua Tahun 2019	60
Gambar 5.7.	Lima Provinsi Asal Pembelian dan Tujuan Penjualan Terbesar Provinsi Papua Tahun 2019	61
Gambar 5.8.	Nilai Investasi Dan Kontribusi Provinsi Papua Dalam Komposisi Penanaman Modal Indonesia Tahun 2015-2019	61
Gambar 5.9.	Perbandingan Andil Provinsi Papua Dengan Daerah Lainnya Dalam Struktur Penanaman Modal Indonesia Tahun 2019	62
Gambar 5.10.	Perkembangan PDRB Triwulanan Provinsi Papua Dengan Sektor Tambang Tahun 2020	62
Gambar 5.11.	Tiga Komponen Pengeluaran Terbesar Pembentuk PDRB Provinsi Papua Tahun 2020	63
Gambar 5.12.	Lima Sektor Terbesar Dalam Komposisi PDRB Provinsi Papua Tahun 2020	63
Gambar 5.13.	Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Papua Periode Februari 2018 – Agustus 2020	63
Gambar 5.14.	Tingkat Inflasi Bulanan Provinsi Papua Tahun 2020	64
Gambar 5.15.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020, 2021 dan 2022	65
Gambar 5.16.	Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Papua Tahun 2021 dan 2022	66





1.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PAPUA 2019-2023





PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN





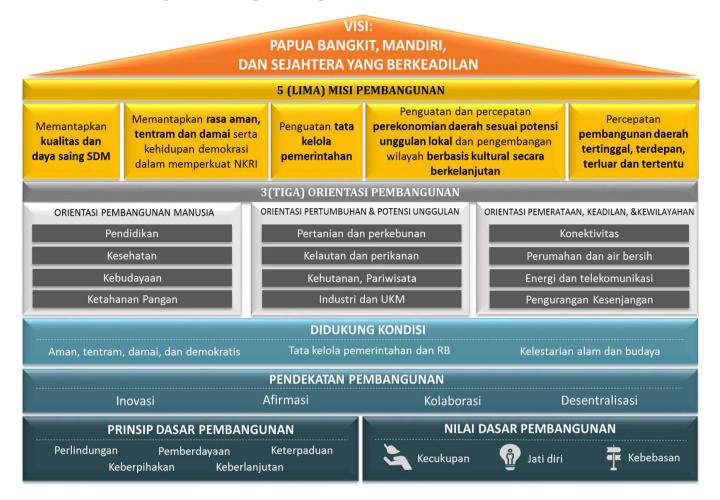
- Memantapkan Kualitas Dan Daya Saing SDM, melalui peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dengan sasaran meningkatnya akses dan mutu pendidikan, derajad kesehatan, sukses PONXX, partisipasi pemuda, ketersediaan pangan, internalisasi nilai budaya dan adat.
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, melalui peningkatkan Tata Kelola Kepemerintahanyangbersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengansasaranmeningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua, kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah, sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangandankinerja daerah.
- M emantapkan Rasa Aman, Tentram Dan Damai Serta Kehidupan Demokrasi M emperkuat NKRI, melalui keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial danharmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua, dengan sasaran meningkatnya suasana tertib & aman, keharmonisan dan kohesitas masyarakat, penegakan hokum, kebebasansipil,hak-hakpolitik & lembaga demokrasi
- Penguatan Dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal Dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Dan Berkelanjutan, melalui peningkatan peertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah, dengansasaran meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, struktur perekonomian yang kokoh, daya saing daerah, akses transportasi, kepatuhan terhadap RTRW, ketersediaan sistem pengairan, perumahan layak huni, ketersediaan energi murah dan baru terbarukan, jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah
- Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Tertentu, melalui peningkatan pemerataan pembangunan, dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung, pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP, percepatan pembangunan wilayah perbatasan, pemberdayaan KAT dan PMKS, ketangguhan menghadapi bencana, pengarusutamaan Gender dan upaya Perlindungan anak



1.2. KERANGKA PEMBANGUNAN PAPUA 2019-2023

Sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat asli Papua maka diterapkan strategi kebijakan pembangunan yang berpedoman pada Grand Strategy. Grand Strategy pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2019-2023 didasarkan pada suaturangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 ori entasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan.

Gambar 1.1. Kerangka Pembangunan Papua 2019-2023

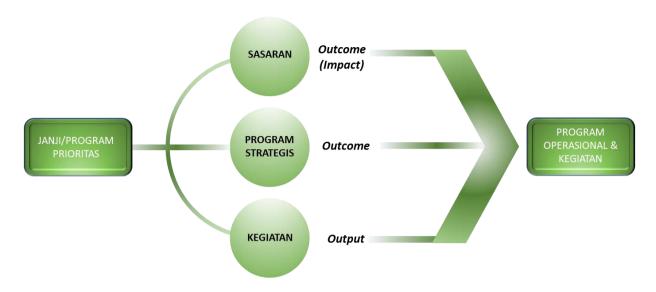


1.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN PAPUA 2019-2023

Prioritas pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalamtataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (outcome/impact), program (outcome) atau kegiatan (output) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan diperangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.



Gambar 1.2. Keterkaitan Janji/Program Prioritas Dengan Program Operasional Dan Kegiatan



Prioritas pembangunan dan program Provinsi Papua 2019-2023 dirumuskan dalam *flagship* 10 TEKAD PAPUA. Ke-10 tekad yang dimaksud yaiu: 1) Generasi Emas (Gemas) Papua; 2) Berdaya Ekomas Papua; 3) Infradas Papua; 4) Perlindungan dan Keberpihakan Adat Papua; 5) Kesetaraan Genderdan Kemitraan Papua; 6) Sukses PON XX Papua; 7) Pembangunan Berkelanjutan Papua; 8) Kampung Mandiri Papua; 9) Mandiri Pangan Papua; dan 10) Reformasi Birokrasi Papua.

Gambar 1.3. Flagship 10 Tekad Papua







2.1. TINGKAT KEMISKINAN

Gambar 2.1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Kemiskinan menurut BPS. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (basic need approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yangmemiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

2017

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2016 499.46 457.54 427.18 2015 402.03 2014

Kemiskinan di Papua cenderung menurun.

Selama periode 2014-2019 misalkan rata-rata mengalami penurunan -0.05% per tahun, sehingga di tahun 2019 tingkat kemiskinan di Papuatercatat 27,53%,

dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 540,10 ribu.

Gambar 2.2. Garis Kemiskinan di Provinsi Papua

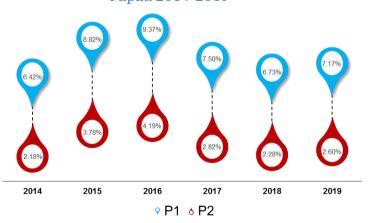
Tahun 2014-2019 (ribu rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Kesenjangan Terhadap Garis Kemiskinan (P1) dan Ketimpangan Pengeluaran (P2) Semakin Mengecil. Meskipun garis kemiskinan cenderung meningkat, namun berkat adanya berbagai kebijakan pro poor and equity, pemerintah Papua berhasil menekan kesenjangan P1 hingga menurun -0,41% per tahun, dan ketimpangan P2 sebesar -0,30% selama tahun 2014-2019.

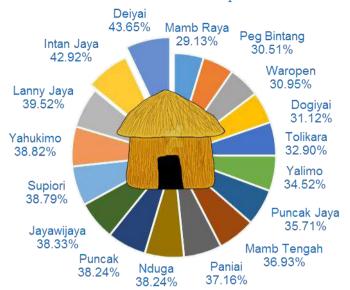


Gambar 2.3. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan Provinsi Papua 2014-2019



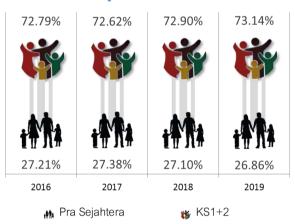
Sebagian besar kantong kemiskinan Papua berada di daerah pegunungan yang sulit akses. Minimnya sarana danprasarana pelayanandasar menjadi penyebab utama kantong kemiskinan paling banyak di daerah-daerah pegunungan, dimana tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 di Kabupaten Deyiai sebesar 43,65% dan Intan Jaya sebesar 42,92%.

Gambar 2.4. Kabupaten Dengan Tingkat Kemiskinan Di atas Rata-rata Papua Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.5. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Proporsi Keluarga Sejahtera di Provinsi Papua tidak banyak mengalami perubahan. Rata-rata pertambahan proporsi Keluarga Sejahtera (KS 1 dan KS2)hanya 0,12% pertahun

selama periode 2016-2019. Di tahun 2019 terdapat 73,14% yang

termasuk sejahtera, dan 26,86% pra sejahtera dari total 188.492

keluarga.

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

1.2. KUAUTAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Akselerasi pembangunan manusia di Papua tergolong cepat. Selama tahun 2014-2019 misalkan rata-rata kenaikan IPM di Papua bisa mencapai 1,40% per tahun, dan telah naik dari kategori IPM Rendah (2014) menjadi IPM Sedang (2019).

Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2014-2019





Provinsi Papua mampu mewujudkan *people centered development dengan baik*. Halinidiindikasikan dengan meningkatnya komponen-komponen IPM Provinsi Papua sepanjang tahun 2014-2019 sebagai berikut.



Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untukdapathidup hingga 65,65 tahun, meningkat0,81 tahun dibandingkan tahun 2014.

Gambar 2.7. Angka Harapan Hidup Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

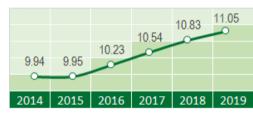


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Penduduk usia 7 tahun memiliki harapan sekolah (HLS) 11,05tahun, lebih lama 1,11 tahundibandingkan dengan tahun 2014.

Gambar 2.8. Harapan Lama Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas terindikasi rata-rata lama sekolahnya (RLS) 6,65 tahun, lebih lama 0,89 tahun dibandingkantahun 2014.

Gambar 2.9. Rata-rata Lama Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya meningkat 944 ribu rupiah dibandingkan tahun 2014,sehingga di tahun 2019 rata-rata pengeluaran perkapita menjadi 7,36 juta rupiah.

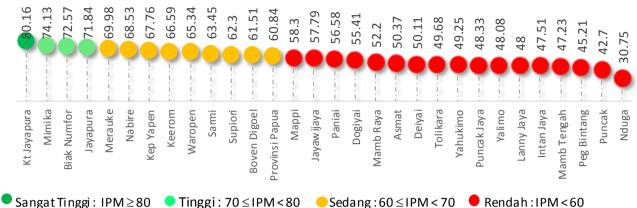
Gambar 2.10. Pengeluaran Per Kapita Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019





Kesenjangan pembangunan manusia di Provinsi Papua masih terlihat sangat tinggi. Misalkandi tahun 2019, disparitas antara IPM tertinggi yaitu Kota Jayapura (80,16) dengan terrendah di Kabupaten Nduga (30,75) adalah sebesar 160,68%.

Gambar 2.11. Penyebaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.12. Angka Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas Di Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

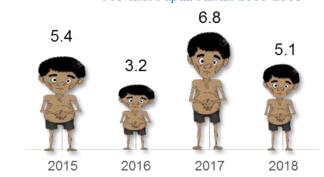
Kasus Gizi Buruk di Papua cenderung fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pencegahan dan penanganan giziburukdi Papua, yang mana tercatat pada tahun 2018 persentase gizi buruk sebesar 5,1%.

Sementara itu balita dengan Gizi Baik mengalami penurunan. Khususnya untuk tahun 2016-2018 penurunannya mencapai 3,5% pertahun. Hal ini patut menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah provinsi.

Keberhasilan dalam menjalankan programprogram literasi memberi dampak peningkatan Angka Melek Huruf di Papua.

Sepanjang tahun 2016-2019 misalkan rata-ratakenaikan Angka Melek Huruf untuk penduduk 15 tahun ke atas kurang lebih sebesar 2,33% per tahun sehingga di tahun 2019 Angka Melek Huruf Papua mencapai 78%.

Gambar 2.13. Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Dengan Status Gizi Buruk Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018



Sumber: Kemenkes RI, 2020 (data diolah)

Gambar 2.14. Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Dengan Status Gizi Baik Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018



Sumber: Kemenkes RI, 2020 (data diolah)

2.3. PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Papua sangat tergantung pada sektor pertambangan.

Disini terlihat, jika disertakan sektor pertambangan maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua hanya 2,74%, akibat adanya tekanan di tahun 2019. Sedangkan tanpa sektor pertambangan rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua mencapai 6,36% per tahun, yang cenderung juga melambat tapi masih dikisaran positip yang cukup tinggi.

Gambar 2.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Provinsi Papua 2014-2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Struktur ekonomi Papua dikuasai oleh sektor-sektor yang ekstratif. Khususnya sektor pertambangan yang menguasai sepertiga PDRB wilayah Papua yaitu 39,55% per tahun, dan sektor pertanian sebesar 11,32% pertahun selama periode 2014-2019.

Gambar 2.16. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Periode 2014-2019 (rata-rata %)



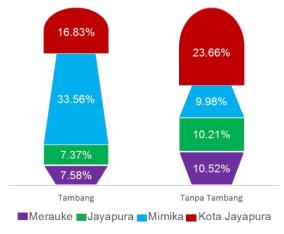
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Perekonomian Papua terkonsentrasi. Kabupaten

Mimika, Jayapura, Merauke dan Kota Jayapura memiliki andil yang paling besar terhadap total PDRB se Papua, keempatnya kurang lebih 65,33% jika dengan sektor tambang, dan 54,37% tanpa sektor tambang. Adanya konsentrasi ekonomi tersebut juga mengindikasikantelah terjadi Aglomerasi Ekonomi di Papua.

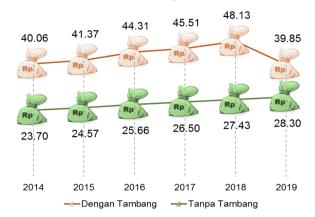


Gambar 2.17. Pemusatan Ekonomi Papua Tahun 2019



2.4. PENDAPATAN PER KAPITA DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Gambar 2.18. Pendapatan Perkapita ADHK 2010 Provinsi Papua Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Penduduk berpendapatan rendah sedikit menyerap hasil pembangunan ekonomi

Sebagai mana yang terlihat pada distribusi pendapatan menurut versi Bank Dunia, pada 2016, sekitar 44,84% pendapatan regional terdistribusi kepada penduduk yang berpendapatan tinggi, 40,01% ke pendapatan sedang, dan hanya 15,15% yang diserap penduduk berpendapatan rendah. Kondisi yang tidak bedajauh juga terlihat di tahun 2019, penduduk dengan pendapatan rendah masih yang paling kecil memperoleh porsi pendapatan regional, yaitu 15,74%.

Kesejahteraan penduduk Papua semakin meningkat. Kondisi ini tercermin pada perkembangan pendapatan per kapita Papua selamatahun2014-2019 yang meningkat sebesar 0,32% (dengan sektor tambang) dan 3,61% per tahun (tanpa sektor tambang), dimana pada tahun 2019 pendapatan per kapita Papua sebesar Rp.39,85 juta (dengan tambang) dan Rp. 28,30 juta (tanpa sektor tambang).

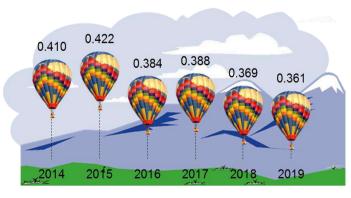
Gambar 2.19. Distribusi Pendapatan Di Provinsi Papua Versi Bank Dunia Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

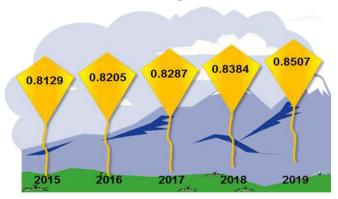
Ketimpangan pendapatan antarpenduduk semakin menurun. Kecenderungan inii tergambarkanpada trend Gini Ratio tahun 2014-2019 yang mengalami penurunan 0,049 poin per tahun, dan tercatatpadatahun 2019 angka Gini Ratio Provinsi Papua sebesar 0,361 yang masuk dalam kategori ketimpangansedang (moderat). Akantetapi disisi lain, ketimpangan antarwilayah belum optimal diturunkan. Indikasinya terlihat pada angka Indeks Williamson (IW) yang relatif meningkat selama tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2019 nilai IW Papua tercatatsebesar 0,8507 (ketimpangantinggi).

Gambar 2.20. Ketimpangan Antar Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.21. Ketimpangan Antarwilayah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

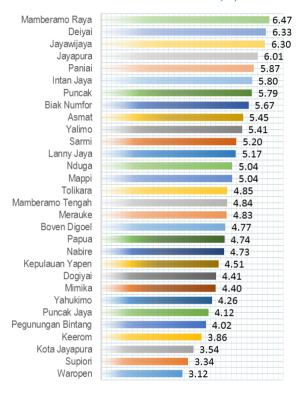




2.5. INFLASI DAN TINGKAT KEMAHALAN HARGA

Perkembangan harga di Provinsi Papua semakin terkendali. Untuk tahun 2015-2019 misalkan tingkat inflasi di Papua (gabungan 2 kota) dapat ditekan sekitar 1,24% per tahun sehingga ditahun 2019 inflasi di Papua hanya sebesar 2,34%.

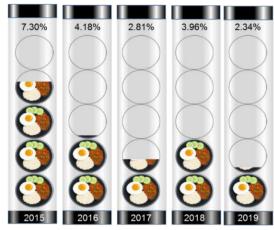
Gambar 2.23. Inflasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Berdasarkan Rata-rata Deflator 2015-2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Papua berhasil menekan tingkat kemahalan harga. Di tahun 2015 IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) Papua adalah 247,98%,dan tahun 2019 sebesar 218,59%, ini berarti IKK Papua dapat diturunkan sekitar -7,31% per tahun.

Gambar 2.22. Inflasi Gabungan 2 Kota Di Provinsi Papua 2015-2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

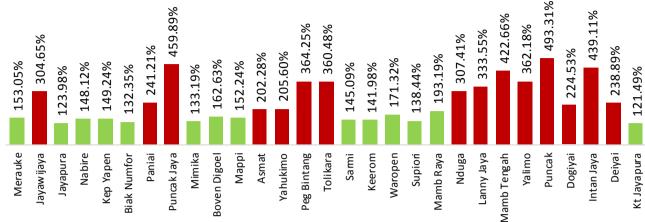
Ada empat kabupaten dengan tingkat inflasi yang paling tinggi di Papua. Fenomena ini tervisualisasikan dari angka deflator kabupaten/kota di Papua tahun 2019, dimana Kabupaten Mamberamo, Deyiai, Jayawijaya dan Jayapura terindikasi mengalami inflasi berkisar 6,01–6,47% yang lebih tinggi dibandingkandaerah lain. Namun demikian angka inflasi ini masih terkategori inflasi yang terkendali. Adapun yang palingrendahadalahdi Waropen hanya 3,12%.

Gambar 2.24. Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua 2015-2019



Semua daerah pegunungan dan sebagian dataran rendah sulit akses di Papua mempunyai IKK yang sangat tinggi. Rata-rata IKK di daerah-daerah tersebut di atas 200%, dan 4 di antaranya lebih dari 400% yaitu Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Puncak dan Intan Jaya.

Gambar 2.25. Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2019

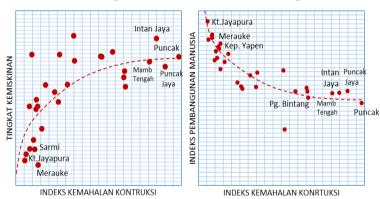


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Terdapat korelasi yang sangat erat antara IKK dengan tingkat kemiskinan dan IPM. Korelasi dengan kemiskinan memiliki arah yang positip, artinya semakin tinggi IKK di suatu daerah maka dipastikan semakin tinggi tingkat kemiskinan, begitu sebaliknya. Sedangkan dengan IPM arahnya negatif, yang menandakan semakin tinggi IKK semakin rendah IPM, begitu sebaliknya. Disini IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Karenanya sangatlah tidak fair jika membandingkan kemiskinan dan IPM di Papua dengan daerah lainnyadi Indonesia tanpa memperhatikan variabel IKK.

Disparitas harga bahan-bahan pokok di Papua sangat tinggi. Sebagai misal untuk tahun 2019, jika Kota Jayapura dijadikan benchmark terlihat bahwa beberapa harga kebutuhan pokok penting seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, susu kaleng dan air mineral, rata-rata disparitas harganya dengan daerah-daerah pegunungan (misalkan Jayawijaya dan Puncak Jaya) dan pantai (misalkan Waropen dan MamberamoRaya)bisa mencapai 107,73%. Disparitashargayangpaling tinggi dengan Kabupaten Jayawijaya rata-rata 119,14% dan Puncak Jaya 183,92%.

Gambar 2.26. Korelasi Antara Indeks Kemahalan Kontruksi dengan Kemiskinan dan IPM Di Papua



Gambar 2.27. Disparitas Harga Beberapa Bahan Pokok Penting Di Papua Tahun 2019/2020

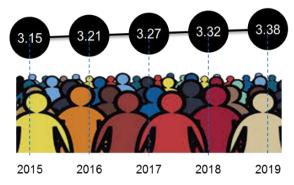


2.6. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Perkembangan penduduk di Provinsi Papua sangat terkendali. Sepanjang tahun 2015-2019 misalkan, pertumbuhannya hanya 1,78% per tahun, sehingga pada tahun 2019 tercatat penduduk Papua sebesar 3,38 juta jiwa

Penduduk Papua terkonsentrasi pada 4 (empat) daerah urban terbesar. Ke-4daerahyang dimaksud adalah Kota Jayapura (8,9%), Kabupaten Merauke (6,7%), Jayawijaya (6,5%) dan Mimika (6,5%).

Gambar 2.28. Perkembangan Penduduk Di Provinsi Papua 2015-2019 (juta jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.29. Komposisi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Provinsi Papua cenderung mengalami transisi demografi. Fenomena ini dapat diperhatikan dari perubahan bentuk piramida penduduk di tahun 2010 yang ekspansif relatif ke stasioner di tahun 2019. Namun demikian komposisi penduduk menurut jenis kelamin relatif tidak mengalami perubahan, penduduk laki-laki masih mendominasi ditahun 2019 dibandingkan perempuan.

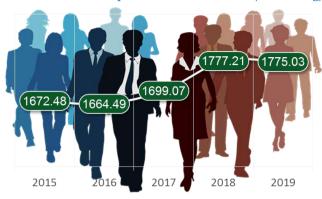
Gambar 2.30. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2019 (ribu jiwa)





Pertambahan jumlah orang yang bekerja di Provinsi Papua cukup pesat. Rata-rata selama tahun 2015-2019 terdapat tambahan orangyangbekerja sekitar 25,64 ribu orang per tahun atau 1,50% pertahun, dimana pada tahun 2019 ada 1.773,03 ribu orangyang terserap dalam lapangan kerja.

Gambar 2.31. Jumlah Orang Bekerja Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (ribu orang)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.32. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (%)

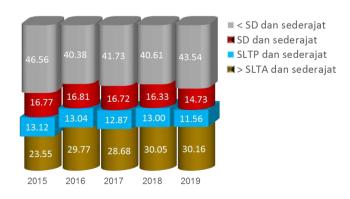


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Provinsi Papua cenderung melambat. Dari angka pertumbuhan sebesar 17,92% di tahun 2015 menjadi 6,80% di tahun 2018, danmengalami kontraksi yang besar di tahun 2019 yaitu -9,10%, sebagai dampak dari menurunnya tingkat produksi tambang di tahun 2019 karena adanya permasalahan internal di perusahan tambang terbesar Papua yaitu PT. Freeport Indonesia. Secara keseluruhan, dalam periode 2015-2019 laju pertumbuhan PDRB tenaga kerja Provinsi Papua masih mencatat positip 8,03% per tahun.

Tenaga kerja di Papua sebagian besar berpendidikan rendah. Selama tahun 2015-2019 tenaga kerja yang berpendidikan SD/sederajad dan dibawahnya sangat mendominasikomposisitenaga kerja, rata-rata sekitar 58,84% per tahun. Sementara yang berpendidikan SLTA dan keatas hanyasebesar 28,44% per tahun.

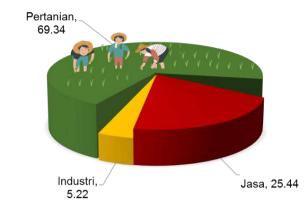
Gambar 2.33. Komposisi Tenaga Kerja Provinsi Papua Menurut Pendidikan Tahun 2015-2019 (%)





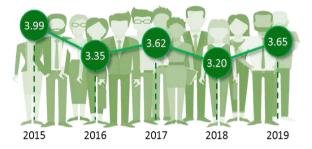
Sektor pertanian menjadi penyanggah pasar lapangan kerja di Papua. Fenomena ini terjadi karena sebagian besar tenaga kerja di Papua berpendidikan rendah, sehingga pasar tenaga kerja yang paling banyak menyerapnya adalah sektor pertanian yang tidak membutuhkan tingkatpendidikan dan keahlian yang tinggi. Rata-rata daya seraptenaga kerja di sektor pertanian selama tahun 2015-2019 adalah 69,34% per tahun.

Gambar 2.34. Struktur Tenaga Kerja Provinsi Papua Rata-rata Periode 2015-2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.35. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (%)

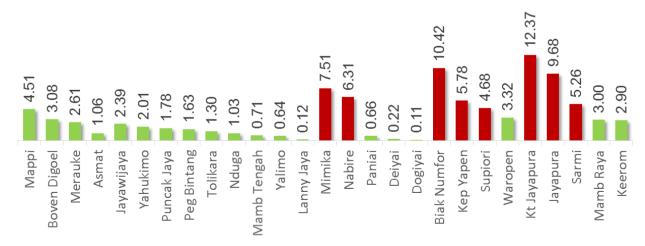


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Tingkat pengangguran di Papua semakin

menurun. Pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua sebesar 3,99%, dan di tahun 2019 sekitar 3,65%, ini berarti ada penurunan sekitar 0,34%. Adapun TPT yang paling tinggi terjadidi Kota Jayapura (12,37%) dan Biak Numfor (10,42%). Lainnya dibawah 10%, dengan TPT yang terrendah di Lanny Jaya, Yalimo dan MamberamoTengahsemuanya dibawah 1%.

Gambar 2.36. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Tahun 2019 (%)





2.7. KELIANGAN DAERAH

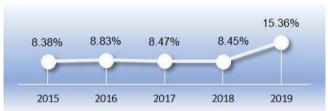
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Papua lebih tinggi dibandingkan belanja daerah. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah selama tahun 2015-2019 adalah 6,59% per tahun vang dipicu oleh peningkatan PAD yang sangat pesat sebesar 22% per tahun. Sedangkan pertumbuhan belanja daerah hanya 2,01% per tahun, dimana cenderung Belanja Tidak Langsung (BTL) menurun, dan Belanja Langsung (BL) terus meningkat.

Gambar 2.37. Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (dalam milyar rupiah)

Komponen APBD	2015	2016	2017	2018	2019	growth
PENDAPATAN DAERAH	11.805,77	12.567,84	13.006,81	13.486,06	15.239,94	6,59%
Pendapatan Asli Daerah	912,91	1.019,73	1.015,78	1.050,37	2.027,64	22,08%
Dana Perimbangan	3.256,24	3.595,09	3.780,55	4.414,24	4.522,41	8,56%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	7.636,07	7.947,79	8.205,15	8.020,85	8.674,68	3,24%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,55	5,23	5,33	0,59	15,22	129,49%
BELANJA DAERAH	12.396,45	11.968,49	13.303,28	13.186,89	13.421,68	2,01%
Belanja Tidak Langsung	6.980,19	7.018,20	7.614,48	8.775,00	6.908,86	-0,26%
Belanja Langsung	5.416,26	4.950,29	5.688,80	4.411,89	6.512,81	4,72%
PEMBIAYAAN DAERAH	1.155,86	473,50	868,78	727,41	927,05	-5,37%
Penerimaan Pembiayaan	1.180,86	503,50	1.009,24	843,66	1.030,92	-3,34%
Pengeluaran Pembiayaan	25,00	30,00	140,46	116,25	103,88	42,77%
SILPA	565,18	1.072,84	572,31	1.026,58	2.745,31	48,46%
Jenis Data	-	Perda	Audited	Audited	Audited	

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Gambar 2.38. Tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua terindikasi sangat rendah sehingga masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Kondisi ini terjadi karenasepanjangtahun 2015-2019 rata-rata tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Papua hanya 9,90% per tahun.

Rendahnya kemampuan keuangan daerah menyebabkan ketergantungan fiskal di Provinsi Papua sangat tinggi. Sebagaimana yang divisualisasikan selama tahun 2015-2019 rata-rata tingkat Ketergantungan Fiskal Provinsi Papua mencapai 91,01% per tahun, yang masuk dalam kategori ketergantungan sangat tinggi, dan cenderung tidak banyak mengalami perubahan.

Gambar 2.39. Tingkat Ketergantungan Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Gambar 2.40. Tingkat Desentralisasi Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Derajad Desentralisasi Fiskal Provinsi Papua sangat kurang. Indikasinya dapat diperhatikan pada perkembangan rasio desentralisasi fiskal selama periode 2015-2019 yang menunjukan persentasenya hanya sebesar 8,95% per tahun.



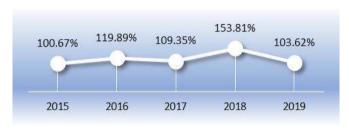
Walaupun kinerja penerimaan PAD sangat efektif, namun pengelolaannya secara makro dapat dinilai kurang efisien. Seperti yang terlihat pada tahun 2015-2019, tingkat efektifitas PAD Provinsi Papua mencapai 118,99% per tahun, yang menandakan realisasinya selalu diatas 100% dari targetyangditetapkan. Akan tetapi karena belanja rutin (pegawai) yang dikeluarkan selama ini selalu jauh diatas 100% dibandingkan penerimaan PAD akhirnya tingkatefisiensi PAD Provinsi Papua dikategorikan Kurang Efisien. Rata-rata inefisiensi penerimaan PAD sebesar 117,47% per tahun. Dengan kata lain belanja rutin yang dikeluarkan lebih besar 17,47% dibandingkan penerimaan PAD.

Gambar 2.41. Tingkat Efektifitas PAD Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

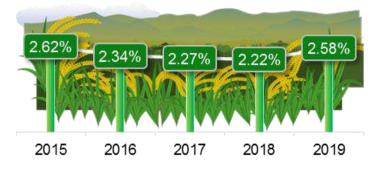
Gambar 2.42. Tingkat Efisiensi PAD Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

2.8. KONTRIBUSI SEKTORAL DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH

Gambar 2.43. Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

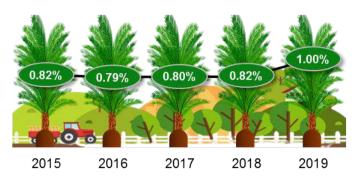
Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB Papua relatif menurun.

Seperti yang terlihat pada tahun 2015-2019, rata-rata mengalami penurunan -0,011% per tahun, sehinggadi tahun 2019 kontribusinya menjadi 2,58%. Padahal sektor ini merupakan tumpuan mata pencahariandan sumber ketahanan pangan bagi penduduk miskin di Papua. Terutama pada komoditi umbi-umbian dan padi.

Disisi lain andil sektor tanaman hortikultur terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusinya meningkat sebesar 0,036% per tahun, dimana kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu 0,19% dibandingkan tahun 2018. Setiap tahun kontribusi sektor tanamanhortikultur kurang lebih 0,95% terhadap PDRB Papua, yangditopang oleh komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan.

Gambar 2.44. Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultur Terhadap **PDRB** Tahun Papua 2015-2019 09 0.95% 0.91% 0.91% 0 90% 2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 2.45. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Andil sektor peternakan dalam perekonomian Papua juga paling rendah dan cenderung **stagnan**. Dalam hal ini kontribusinya selama periode 2015-2019 hanya bergerak 0,040% per tahun. Dimana rata-rata kontribusi sektor peternakan hanya mencapai 0,87%. Jenis peternakan yang berkembang selama ini adalah peternakan rakyat, khususnya untuk ternakayam, kambing dan sapi.

Gambar 2.47. Kontribusi Sektor Kehutanan PDRB Papua Terhadap Tahun 2015-2019



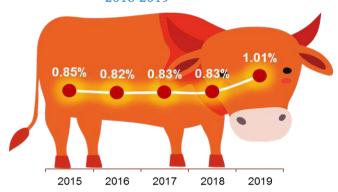
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Sektor perikanan merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar berkontribusi terhadap PDRBPapua

Selama tahun 2015-2019 misalkan, rata-rata kontribusinya bisa mencapai 4,67% pertahun,dengan kenaikannya sekitar 0,101% per tahun. Sub sektor perikanan yang paling berkembang selama ini adalah perikanan laut, terutama perikanan tangkap.

Potensi sektor perkebunan yang begitu besar di Papua tampaknya belum dikelola optimal. Indikasinya dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Papua hanya sekitar 0,82-1,00% selama periode 2015-2019, yang tampak tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ketahun. Adapun komoditi andalan perkebunan Papua selama ini adalah kelapa sawit, kelapa dalam, sagu, dan coklat.

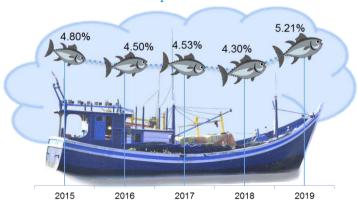
Gambar 2.46. Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



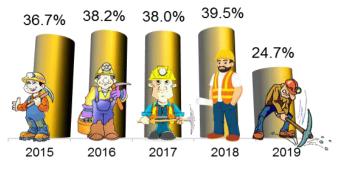
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Papua cenderung menurun. Hal dapat dilihat sepanjang tahun 2015-2019 yang mengalami penurunan -0,043% per tahun. Dimana pada periode tersebutratarata kontribusi sektor kehutanan yang dimotori oleh hutan kayu terhadap PDRB Papua sebesar 1,38% per tahun.

Gambar 2.48. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Gambar 2.49. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Provinsi Papua masih tergolong daerah non industrialisasi. Argumentasinya karenakontribusi sektor industri terhadap PDRB Papua selama tahun 2015-2019 selalu di bawah 10% (kriteria UNIDO), kurang lebih sekitar 2% per tahun. Dampaknya, ketergantungan Papua terhadap berbagai produk industri dari luar sangat tinggi. Selama ini sektor industri yang berkembang cepat sebatas padaindustri mikro dan kecil dengan jumlah unitusaha, produksi dan investasi yang kurang signifikan memperbesar porsi sektor industri dalam pangsa PDRB Papua.

Gambar 2.51. Kontribusi Sektor Kontruksi Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Peranan sektor pariwisata dalam mendorong ekonomi Papua terus meningkat. Sepanjang tahun 2015-2019 misalkan, sektor yang digerakanoleh aktifitas transportasi, jasa angkutan, hotel danrestoran, serta jasa-jasa hiburan ini mampu memberi kontribusi terhadap PDRB Papua sekitar 7,10% per tahun yang cenderung mengalami peningkatan.

Struktur ekonomi Papua sangat dikendalikan oleh sektor pertambangan. Ini disebabkan peranannya dalam menciptakan produk regional Papua paling tinggi dan mendominasistruktur ekonomi wilayah, rata-rata 35,40% per tahun, sehingga tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi Papua juga sangat ditentukan oleh variasi naik turunnya produksi tambang. Dua komoditi andalan di sektor pertambangan Papua selama ini adalah tembaga dan emas

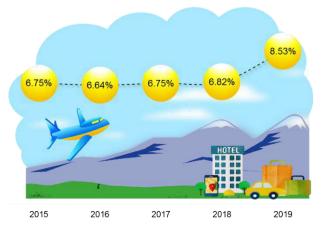
Gambar 2.50. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Sektor kontruksi merupakan salah satu kontributor terbesar dalam perekonomian wilayah Papua. Sebagai indikatordapatdilihatandilnya dalam menciptakan PDRB Papua selama tahun 2015-2019 mencapai 11,44% per tahun. Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Papua selama ini menjadi faktor pendorong yangsangatdominan dalam memperbesar porsi sektor kontruksi dalam struktur PDRB.

Gambar 2.52. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Gambar 2.53. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Sektor perdagangan termasuk penyumbang terbesar terhadap PDRB Papua. Kontribusinya selama tahun 2015-2019 bisa mencapai 8,37%pertahun, yang dimotori oleh perdagangan besar dan kecil, seperti pertokoan, super market dan mall, yang banyak tersebar dibeberapa kota besar Papua, antara laindi Kota Jayapura, Merauke, Timika, Biak Numfor dan Nabire.

2.9. KETAHANAN PANGAN

Perkembangan produksi komoditi penting bahan makanan di Papua sangat variatif.

Beberapa komoditi ada yang mengalami peningkatan tinggi, dan ada juga yang mengalami penurunan.Berikut perkembangan masing-masing komoditi pangan.



Tingkat produksi padi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sekitar 6,67% per tahun.



Sementara produksi umbi-umbian yangmenjadi makanan pokok di Papua mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni -17,74% per tahun.



Untuk produksi daging sapi, kecenderunganjuga mengalami penurunan yaitu -1,62% per tahun.



Termasuk produksi daging babi, relatifmenurun sebesar -0,93% per tahun.



Adapun produksi daging ayam mengalami peningkatan yang pesat, sekitar 13,13% per tahun.



Begitu juga dengan hasil produksiikutannya yaitu telur mengalami peningkatan yang lebih pesat, sebesar 33,34%% per tahun



Terakhir, produksi perikanan lautdanbudidaya, kecenderungannya menurun sebesar -1,10%per tahun.

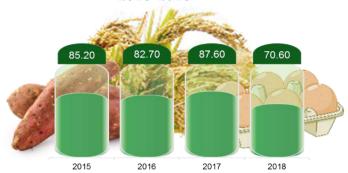
Gambar 2.54. Tingkat Produksi Komoditi Penting Bahan Makanan Di Provinsi Papua 2015 dan 2019 (dalam ton)

2015 181.769	growth 6,67% per tahun	2019 235.340
2015 493.313		2019 225.856
2015 2.709	growth -17.74% per tahun growth -1.62% per tahun	2019 2.538
2015 8.253	growth -0.93% per tahun	2019 7.951
2015 7.419	growth 13,13% per tahun	2019 12.152
2015 4.655	growth 33,34% per tahun	2019 14.714
2015 243.619	growth -1,10% per tahun	2019 233.111

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2020 (data diolah)

Seiring dengan penurunan produksi beberapa komoditi pangan penting, Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Papua juga ikut menurun. Di tahun 2015 Skor PPH Papua adalah 85,20 yang terkategori tinggi, kemudian di tahun 2018 skornyaturunmenjadi 70,60 yang masuk dalam kategori sedang.

Gambar 2.55. Skor PPH Provinsi Papua 2015-2018

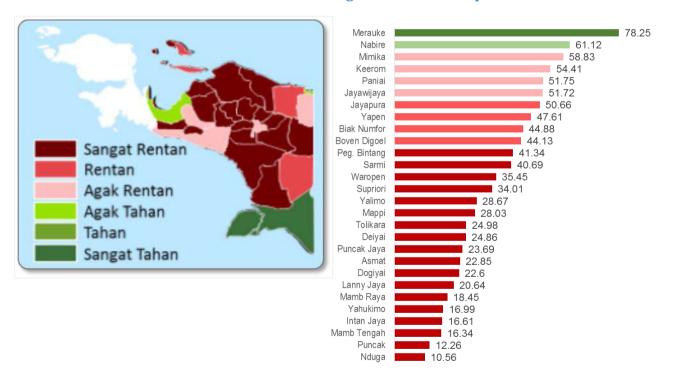


Sumber: BKP Kementerian Pertanian RI, 2020 (data diolah)

Kondisi ketahanan pangan setiap daerah di Papua perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Hal ini karena dari 28 kabupaten/kota yang terukur IKP (Indeks Ketahanan Pangan) terdapat26daerahyangkondisinya rentan pangan, yang terdiri atas 4 daerah Agak Rentan, 4 daerah Rentan, dan 18 daerah SangatRentan. Dapatdikatakan semua kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan dan dataran rendah sulit akses terka tegori daerah-daerahyang sangat rentan pangan.

Gambar 2.56. Peta dan Indeks Ketahanan Pangan Di Provinsi Papua 2019



Sumber : Pemerintah Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



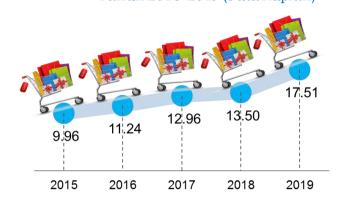


3.1 PENGELLIARAN KONSUMSI PER KAPITA

Pengeluaran konsumsi per kapita penduduk Papua mengalami peningkatan yang pesat.

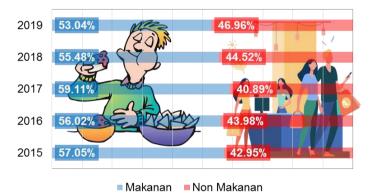
Setiap tahun rata-rata meningkat 15,52% selama tahun 2015-2019, dimana tercatat pada tahun 2019 pengeluaran per kapita di Papua sudah mencapai Rp 17,51 juta.

Gambar 3.1.Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Tahun Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 3.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Menurut Kelompok Komoditi Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Porsi pengeluaran penduduk terhadap kelompok non makanan semakin naik.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Papua bertambah baik. Pada tahun 2019, persentase pengeluaran terhadapnonmakanan mencapai 46,96% atau meningkat sebanyak 4,01% dibandingkan tahun 2015.

Pengeluaran per kapita per tahun antarkabupaten/kota sangatvariatif.

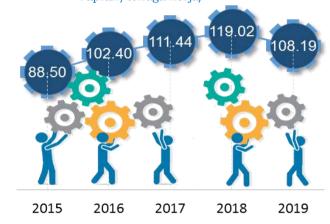
Namun sebagian besar terkumpul pada kelompok pengeluaran antara 10-15 juta per kapita per tahun, diantaranya Mappi, Asmat, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Nduga, total ada 14 kabupaten. Untuk daerah dengan pengeluaran per kapita diatas 20 juta per tahun adalah Kota Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Jayawijaya dan Pegunungan Bintang.

Gambar 3.3. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Tahun Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019



3.2. PRODUKTIFITAS DAN INVESTASI REGIONAL

Gambar 3.4. Produktifitas Regional Tenaga Kerja Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (juta rupiah/tenaga kerja)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Perkembangan investasi regional di Provinsi Papua sangat fluktuatif. Hal ini tervisualisasikan pada kecenderungan realisasi investasi di Papua selama tahun 2015-2019. Untuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), rata-rata investasi yang direalisasikan sebesar Rp. 677,18 milyar, dengan pertumbuhannya yang sangat fluktuatif naik turun. Sementara untuk PMA (Penanaman Modal Asing) cenderung stabil, dengan rata-rata realisasi investasinya sebesar US\$ 1,212.56 juta.

Gambar 3.5. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019

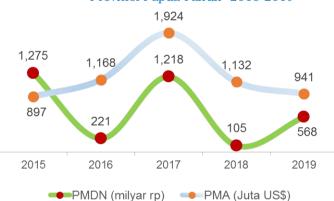
Produktifitas regional Provinsi Papua

tergolong tinggi. Selama tahun 2015-2019 misalkan,

produktifitasnya mencapai 105,91 juta rupiahpertenaga kerja per tahun. Fenomena ini mengindikasikan tenaga kerja di Papua mampu bekerja baik dengan hasil yang

cukup tinggi, meskipun sebagian besar tingkat

pendidikannya sangat rendah.



Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

Gambar 3.6. ICOR Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

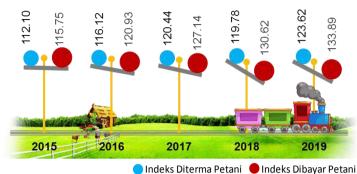
Provinsi Papua memiliki kinerja investasi dengan daya saing yang tinggi. Indikasinya terlihat pada rata-rata ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) selama tahun 2015-2019 sebesar 3,07 yang tergolong moderat. Angka ICOR sebesar 3,07 tersebut menunjukan bahwa untuk menaikan pendapatan regional sebesar 1 milyar rupiah diperlukan investasi sebesar Rp. 3,07 milyar rupiah.



Kriteria ICOR. Semakin tinggi ICOR menggambarkan kinerja investasi semakin tidak efisien. Sebaliknya semakin rendah ICOR mengindikasikan investasi kurang dapat diandalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Idealnya menurut para ahli ekonomi ICOR yang moderat antara 3 – 4 poin.

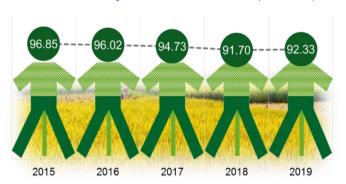
Penerimaan petani di Papua selalu mendapat tekanan dari pengeluaran konsumsinya. Kondisi ini disebabkan nilai bayar petani terus di atas nilai penerimaan petani, sebagaimana yang tercermin pada perkembangan komponen NTP (Nilai Tukar Petani) selamatahun 2015-2019, dimana Indeks Bayar Petanirata-rata 125,66 poin per tahun, sementara Indeks Diterima Petani lebih rendah, hanya 118,41 poin per tahun.

Gambar 3.7. Komponen Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Periode 2015-2019 (dalam %)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 3.8. Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Periode 2015-2019 (dalam %)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Neraca pendapatan petani Papua dalam kondisi yang terus defisit. Pada tahun 2015-2019 misalkan, defisitnya tampak semakin besar, yang ditandai dengan menurunnya NTP sebesar -1,13 poin per tahun,danbesarnya defisit sekitar -5,67 poin per tahun selama periodetersebut. Fenomena ini menandakan kesejahteraan petani secara umum di Papua belum pada kondisi yang baik.



Kriteria penilaian NTP menurut BPS

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus.
 Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas.
 Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP< 100, berarti petani mengalami defisit.
 Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Penilaian NTP secara sektoral menunjukan nelayan dan peternak di Papua memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik

Sebagaimana yang tergambarkan di tahun 2019, NTP sektor perikanan sebesar 101,20 poin, dan sektor peternakan sebesar 107,17 poin. Ini artinya,nelayandan peternak di Papua mengalami surplus pendapatankarena penerimaan lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Dengan demikian nelayan dan peternak jauh lebih sejahtera dibandingkan petani tanaman pangan/hortikultura/perkebunan yang memiliki NTP di bawah 100.

Gambar 3.9. Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Menurut Sub Sektor Tahun 2019 (dalam %)



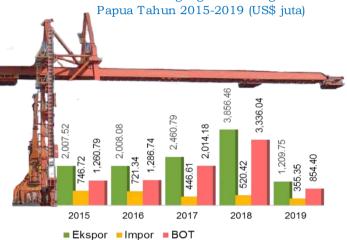
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



3.4. EKSPOR NONMIGAS

Neraaca perdagangan luar negeri (BOT) Provinsi Papua selalu dalam keadaan surplus. Ini menandakan bahwa nilai ekspor Papua selalu lebih tinggi dibandingkannilai mpor. Selamatahun 2015-2019, rata-rata nilai BOT Papua sebesar 1,750.43 juta US\$ per tahun. Dimana ada 6 negara tujuan utama penyumbangsurplus terbesar dalam neraca perdagangan Papua diantara 2015 dan 2019 yaitu Jepang, India, Korea Selatan, Filipina, dan Tiongkok. India merupakan negara tujuan ekspor terbesar di tahun 2015 yaitu 38,76%, dan Filipina di tahun 2019 sebesar 44,98%.

Gambar 3.10. Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi
Panua Tahun 2015-2019 (US\$ juta)



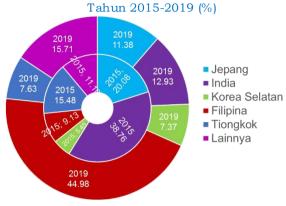
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 3.12. Tabel Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Pelabuhan Asal (US\$ juta)

Pelabuhan Asal	2015	2016	2017	2018	2019
Frans Kaisepo	50.29	2.30	1.62		0.02
Jayapura	0.80	1.71	11.21	3.65	3.22
Serui	55.13	51.16	53.96	41.62	61.65
Amamapare	1,832.19	1,908.23	2,349.57	3,759.96	1,087.07
Sentani	0.25	0.11	0.12	0.02	0.07
Bade	68.54	44.57	43.92	50.42	52.32
Lainnya	0.33	0.0006	0.38	0.79	5.41
Jumlah	2,007.52	2,008.08	2,460.79	3,856.46	1,209.75

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 3.11. Komposisi Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan

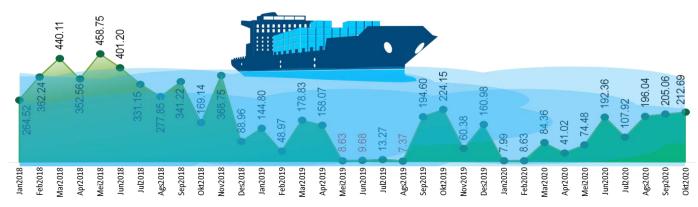


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Hampir seluruh ekspor Provinsi Papua berasal dari satu pelabuhan asal. Inikarena ada 1 pelabuhan asal yang menguasai pangsa muatan ekspor Papua lebih dari 90%, yaitu Pelabuhan Amamapre Kabupaten Mimika dengan nilai ekspornya rata-rata mencapai US\$2,187.40juta atau sekitar 93.83% dari total ekspor Papua per tahun selama periode 2015-2019.

Nilai ekspor bulanan Provinsi Papua sangat fluktuatif dan cenderung menurun. Terutama pada periode 2018-2020 rata-rata turun sebesar -0,66% per bulan. Sempat di bulan Maret, Mei dan Juni 2018 nilai ekspor Papua mengalami puncaknya sekitar 433.35 juta US\$ per bulan, namun setelah itu terus menurun hingga titik terendah di bulan Mei dan Juni 2019 sebesar 9.16 juta US\$ per bulan. Trend yang negatifini disebabkan ekspor Papua sangat tergantung pada komoditi tambang (tembaga dan emas), sehingga pasang surutnya nilai ekspor sangat ditentukan oleh produksi tambang tersebut.

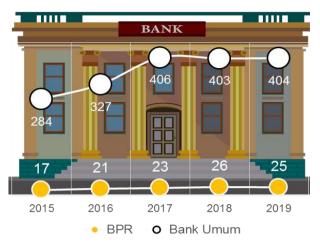
Gambar 3.13. Nilai Ekspor Bulanan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2018-2020 (US\$ juta)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

3.5. SEKTOR PERBANKAN

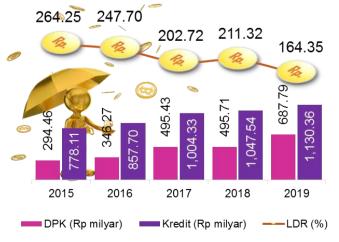
Gambar 3.14. Jumlah Bank Umum dan BPR Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (unit)



Sumber: IDAP OJKRI, 2020 (data diolah)

Rasio kredit terhadap simpanan pada bank umum (LDR) di Papua masih terjaga aman dan tampak terkendali. Selama tahun 2015-2019 rasio LDR-nya hanya sebesar 64,06% per tahun, masih jauh dibawah ambang batas sesuai peraturan BankIndonesia sebesar 94%. Fakta ini mengindikasikanbahwa bankumum di Papua masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ekspansi penyaluran kredit kepada masyarakat (personal dan swasta).

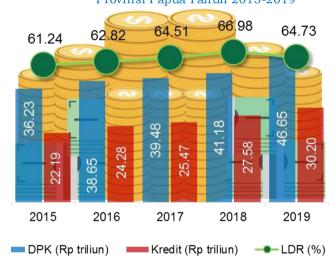
Gambar 3.16. Dana Pihak Ketiga, Kredit, Dan Loan To Deposit Ratio Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: IDAP OJKRI, 2020 (data diolah)

Kondisi perekonomian yang terus berkembang menjadi salah satu faktor yang mendorong jumlah bank di Papua terus mengalami peningkatan. Baik pada bank umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat) rata-rata mengalami peningkatan kurang lebih 9,67% per tahun selama periode 2015-2019. Total bank umum di tahun 2019 adalah 404 unit, sedangkan BPR sebanyak 25 unit.

Gambar 3.15. Dana Pihak Ketiga, Kredit, Dan Loan To Deposit Ratio Bank Umum Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: IDAP OJKRI, 2020 (data diolah)

Lain halnya dengan BPR, terlihat rasio kredit terhadap simpanan sudah melampaui ambang

batas. Untuk periode yang sama, rasio LDR BPR di Papua rata-rata di atas 200%, dengan kecenderungan yangterus menurun. Terakhir di tahun 2019 LDR BPR di Papua sebesar 164,35%, dengan kata lain mengalami penurunan-24,98% per tahun dari tahun 2015. Sudah sepatutnya BPR di Papua lebih ketat memberikan kredit kepada masyarakat, dan memperbesar dana pihak ketiga agar rasio LDR dapat ditekan hingga dibawah ambang batas aman 94%.



3.6. TINGKAT KRIMINAUTAS

Tingkat Kriminalitas di Papua cenderung mengalami penurunan yang signifikan

Khususnya jika diperhatikan selama periode 2016-2019, kurang lebih menurun sebesar -25,72% per tahun, sehingga di tahun 2019 angka kriminalitas menjadi 11,05 per 10.000 jiwa penduduk. Kondisi ini menandakan tingkat keamanan di Papua semakin terjamin setiap tahunnya.

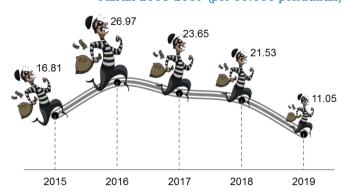
Gambar 3.18. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Di Provinsi Papua Tahun 2016-2018 (%)



Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

Kesadaran penduduk dalam melaporkan sebagai korban kejahatan kepada pihak keamanan masih belum maksimal. Fenomenaini tercermin dari proporsi korban kejahatan yang tidak melapor kepada polisi sangat tinggi, yaitu 80,08% per tahun dari total persentase korban kejahatansekitar 1,63% per tahun selama periode 2015-2018. Dengan kata lain, rata-rata hanya ada 19,92% saja korban kejahatanyang melaporkan ke polisi.

Gambar 3.17. Angka Kriminalitas Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (per 10.000 penduduk)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Disisi lain Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Papua terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh untuk tahun 2016-2018 persentase kriminalitas yang tertangani meningkatsetiap tahunnya sekitar 2,57%. Dan tercatat di tahun 2018 angkanya sebesar 85,60%. Dengan kata lain dari total kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2018, kurang lebih 85,60% yang sudah ditangani oleh pihak keamanan.

Gambar 3.19. Persentase Korban Kejahatan, Korban Yang Melapor Dan Tidak Melapor Ke Polisi Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018



Korban Kejahatan

- --- Korban Kejahatan Melapor Ke Polisi
- ---Korban Kejahatan Tidak Melapor Ke Polisi

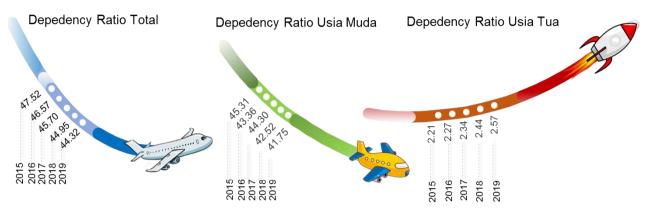
Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)



3.7. RASID KETERGANTUNGAN

Tingkat Ketergantungan Penduduk (*Depedency Ratio*) di Papua terus mengalami penurunan. Dari angka sebesar 47,52 di tahun 2015 menjadi 44,32 per 100 penduduk usia produktif di tahun 2019. Dandiproyeksikan halini akan terus berlangsung hingga tahun 2025-2033 dimana Papua akan memproleh bonus demografi, yaitu kondisi terdapat keberlimpahan penduduk yang berada pada usia produktif, sehingga banyaktersedia jumlah pekerja yang dapat menciptakan surplus nilai tambah regional baik itu melalui penerimaan upah maupun pajak.

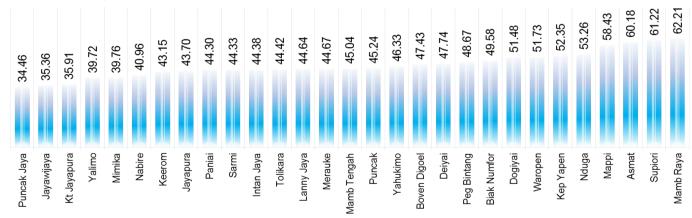
Gambar 3.20. Depedency Ratio Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (per 100 penduduk usia produktif)



Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)

Penurunan ketergantungan penduduk di Papua lebih banyak dikontribusi berkurangnya angka ketergantungan pada penduduk usia muda. Rata-rata penurunan angka ketergantungan usia muda di Papua selama tahun 2015-2019 misalkan bisa mencapai -2,07% per tahun, sehingga pada tahun 2019 tercatatrasio ketergantungan pada usia muda sebesar 41,75 per 100 penduduk usia produktif. Sementara pada usia tuamengalami peningkatan sebesar 3,36% per tahun untuk periode yang sama, dimana pada tahun 2019 rasionya sebesar 2,67 per 100 penduduk usia produktif.

Gambar 3.21. Depedency Ratio Total Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019 (per 100 penduduk usia produktif)



Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)

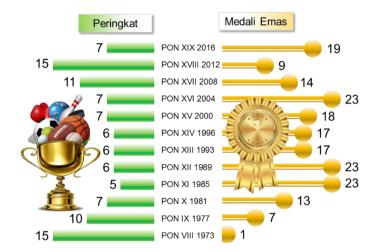
Sampai dengan tahun 2019, cukup banyak daerah di Papua yang mendapat tekanan dari penduduk usia non produktif. Delapan daerah diantaranya adalah yang paling tinggi, yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, Asmat, Mappi, Nduga, Kepulauan Yapen, Waropen dan Dogiyai, yang diindikasikan dengan rasio ketergan tungan lebih dari 50, antara 51,73 –62,21 per 100 penduduk usia produktif. Adapun yang paling rendah rasio ketergan tungan nya di Kabupaten Puncak Jaya, Jayawijaya, Yalimo, Mimika dan Kota Jayapura yakni dibawah 40 per 100 penduduk usia produktif.



3.8. PRESTASI PAPUA DALAM PON DAN PERSIAPAN PON XX PAPUA

Provinsi Papua mampu menunjukan prestasinya dalam setiap PON (Pekan Olah Nasional) di Indonesia. Prestasi yang sangat membanggakan sempat diukir Provinsi Papua di PON XI Tahun 1985. Kala itu Provinsi Papua mampu berada diperingkat ke-5 dengan perolehan medali emas sebanyak 23 buah. Sampai dengan PON XVI tahun 2004 Provinsi Papua selalu berada di posisi 10 besar di Indonesia. Namun, di PON XVII – XVIII prestasi Papua tidak lagi di posisi 10 besar. Kemudian di tahun 2016 pada PON XIX di Jawa Barat, kembali Provinsi Papua dapat mengoreksi peringkatnya naik ke posisi ke-7, dengan total medali emas sebanyak 19 buah.

Gambar 3.22. Prestasi Papua Dalam PON Tahun 1973-2016



Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Pada PON XIX yang diadakan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua menyertakan kontingennya untuk mengikuti 25 Cabor (Cabang Olah Raga), dimana semuanya mampu menghasilkan medali.

Total medali yang dapat diraih sebanyak 69 medali, yang terdiri atas 19 medali emas, 18 perakdan32 perunggu. Terdapat 13 Cabor yang menyumbangkan medali emas, yang terbanyak dari dayung yaitu 4 medali, kemudian selam, bilyardan dan sa masing-masing 2 medali emas. Sedangkan Cabor lainnya masing-masing meraih 1 medali emas.

Gambar 3.23. Perolehan Medali Provinsi Papua Pada PON XIX Tahun 2016



Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2019 (data diolah)



Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan PON XX tersebut, yang telah diundur menjadi tahun 2021, maka Pemerintah Provinsi Papua selaku tuan rumah telah melaksanakan berbagai tahapan persiapanmulaitahun 2015, guna mencapai 4 (empat) Sukses PON, yaitu Sukses Penyelenggaraan, Sukses Prestasi, Sukses Pemberdayaan Ekonomi, dan Sukses Administrasi.



Terkait brand identity PON XX Papua, telah dibuat maskot, slogan dan logo yang diluncurkan tahun 2019. Maskot PON XX Papua adalah dua hewan khas Papua, yakni Kangguru Pohon yangdiberinama Kangpo, dan Burung Cendrawasih yang diberi nama Drawa. Selain itu juga ada slogan "Torang Bisa", dan logo PON XX Papua.

Gambar 3.24. Brand Identity PON XX Papua



Maskot Kangpo menggunakanrumbai pada bagian kepala dan pinggang sebagai representasi busana kebesaran asal Papua, yangdilengkapi dengan ukiran pada ikat pinggang. Kangpo juga dilengkapi dengan ikon Gunung Jayawijaya yang ditempatkan pada bagian depan mahkota.



Slogan PON XX 2020, "Torang Bisa". Kata tersebut merupakan penyemangat khas Papua yang bertujuan untuk mengobarkan semangat juang para atlet.



Maskot Drawa memiliki mahkotadan rumbai. Bagian dada juga dilengkapi dengan tali merah putih, juga warna jingga pada bagian dalam tubuhnya sebagai lambang kehangatan, persahabatan, dan cinta kasih. Warna kuning mewakili warna cendrawasih yang melambangkan semangat dan kegembiraan. Jumlah sayap, ekor, dan jari pada kedua kaki Drawa mencirikan jadwal pembukaan PON XX.



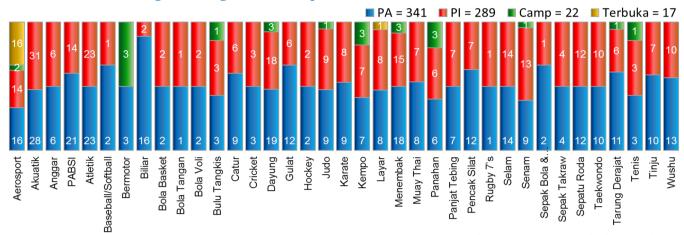


Logo PON XX adalah gambaran Stadion Papua Bangkit, simbol kemegahan di bidang olahraga rakyat Papua. Stadion Papua Bangkit nyaris menyamai Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, menjadi ikon olahraga di Papua yang bertaraf internasional dengan standar FIFA.



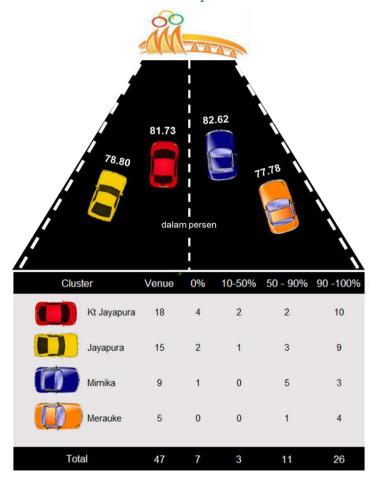
KONI telah menetapkan jumlah cabang olah raga, disiplin cabang olah raga dan nomor pertandingan pada PON XX Papua. Berdasarkan Surat Keputusan KONI Nomor 100 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penetapan Cabang Olahraga, Nomor Pertandingan/Perlombaan, dan Kuota Atlet Setiap Cabang Olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua, diputuskan mengenai penyelenggaraan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga dan 679 nomor pertandingan dalam PON XX Papua.

Gambar 3.25. Cabang Olah Raga PON XX Papua



Sumber: PB PON XX Provinsi Papua (2020)

Gambar 3.26. Penyelesaian Pembangunan Arena PON XX Papua Menurut Klaster



Sumber: PB PON XX Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Pemerintah Provinsi Papua membangun 47 venue untuk melaksanakan pertandingan setiap Cabor yang telah ditetapkan. Sampai saat ini sudah sekitar 80,47% venue yang terbangun untuk digunakan, yang tersebar pada 4 (empat) klaster yaitu:

- Kota Jayapura ada 18 venue dimana sekitar81,73% telah selesai dibangun;
- Kabupaten Jayapura ada 15 *venue* yangtelah selesai dibangun 78,50%.
- Kabupaten Mimika sebanyak 9 venuedengantingkat kemajuannya 82,62% terbangun;
- Kabupaten Merauke sebanyak 5 venue dengan penyelesaiannya 77,78%.



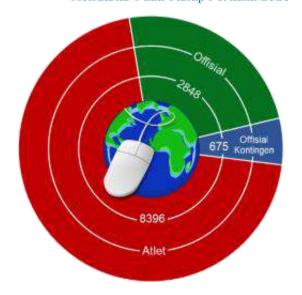
Sesuai dengan pembangunan venue yang terklaster, penyelenggaran Cabor PON XX Papua juga tersebar pada masing-masing klaster tersebut. Dalam hal ini Ke-37 cabang olah raga yang telah ditetapkan akan dipertandingkan di Klaster Kota Jayapura sebanyak 17 cabor, Klaster Kabupaten Jayapura sebanyak 16 cabor, Klaster Kabupaten Mimika sebanyak 11 cabor, dan Klaster Kabupaten Merauke sebanyak 6 cabor. Berikutini rincian Cabor di masing-masing klaster.

Gambar 3.27. Penyebaran Cabor PON XX Papua Menurut Klaster

Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Kab. Mimika	Kab. Merauke
Rugby 7's	Selam Kolam	Tarung Derajat	Sepakbola Putri
Tinju	Silat	Judo	Anggar
Karate	Kempo	Bola Tangan	
Bulutangkis	Sepakbola Penyisihan Putra	Futsal	Wushu
Tenis	Cricket	Panjat Tebing	Gulat
Sepakbola Putra	Menembak	Billiard	Catur
Sepatu Roda	Muaythai	Bola Basket	
Sepak Takraw	Senam	Atletik	Bermotor
Selam Laut Tae Kwon Do	Baseball & Softball		
Layar	Hoki	Terjun Payung	
Dayung	Polo Air	Terbang Layang	
Bola Voli (Indoor & Pasir)	Renang Artistik	Aeromodeling	
Panahan	Renang		
Baseball & Softball	Loncat Indah		
Angkat Besi/Berat/Binaraga	Paralayang		
Renang Perairan Terbuka	Gantole		

Sumber: PB PON XX Provinsi Papua (2020)

Gambar 3.28. Jumlah Kontingen PON XX Papua Yang Mendaftar Pada Tahap Pertama 2020



Sumber: PB PON XX Provinsi Papua (2020)

Dalam rangka memudahkan peserta dan panitia, pendaftaran peserta PON XX Papua menggunakan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terintegrasi dengan bidang lainnya. Dimana pada tahap pertama (Entry by Sport and by Number) tanggal 20 Februari s/d 19 April 2020 sudah terdaftar 11.919 peserta, terdiri atas 8.396 atlet, 2.848 ofisial dan 675 ofisial kontingen. Dari daerah, kontingen yang terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.528 orang (12,82%), Papua 1.384 orang (11,61%) dan Jawa Barat 1.241 orang (10,41%). Sedangkan untuk kontingen dengan jumlah sedikit adalah Provinsi Maluku 21 orang (0,18%), Kalimantan Utara 48 orang (0,40%))dan Sulawesi Utara 50





4.1. AKSES PENDIDIKAN

Jumlah guru dan Siswa SD di Provinsi Papua mengalami peningkatan sajak tahun 2015 hingga tahun 2019. Telihat pada tahun 2015 jumlah guru SD sabanyak 16.825 jiwa meningkat signifikan pada tahun 2019 sabanyak 18.037 jiwa. Sementarajumlah siswa SD pada tahun 2015 sebanyak 412.187 jiwa meningkat hingga 442.845 jiwa pada tahun 2019.

Gambar 4. 1. Jumlah Guru & Murid SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Gambar 4.2. Jumlah Guru & Murid SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Jumlah guru dan Siswa SMP di Provinsi Papua juga mengalami peningkatan sajak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 jumlah guru SMP sabanyak7.331 jiwa meningkat pada tahun 2019 hingga 8.315 jiwa. Sementara jumlah siswa SMP pada tahun 2015 sebanyak 115.296 jiwa meningkat hingga 131.812 jiwa pada tahun 2019.

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah guru dan Siswa SMA di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan.

Jumlah guru SMA pada tahun 2015sabanyak 3.971 jiwa meningkat hingga 4.479 jiwa pada tahun 2019. Sementara jumlah siswa SMA pada tahun 2015 sebanyak 53.851 jiwa meningkat hingga 68/344 jiwa pada tahun 2019.

Gambar 4.3. Jumlah Guru & Murid SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019





Rasio Guru/M urid janjang pendidikan SD di provinsi Papua masih dalambatas ideal. Rasio guru/murid SD pada tahun 2015 sabanyak 24,50 atau dengan kata lain 1 guru mengajar 24 siswa, kemudian meningkat menjadi 27,67 pada tahun 2017 sampai dengantahun 2018 menjadi 27,90, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 24,55 atau dengan kata lain 1 guru mengajar 24 siswa SD

Gambar 4.5. Rasio Guru & Murid SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

Rasio Guru/Murid janjang pendidikan SMA di provinsi Papua masih dalam batas ideal. Rasio guru/murid SMA pada tahun 2015 sabanyak 13,56 atau dengan kata lain 1 guru mengajar 14 siswa, kemudian meningkatsampai dengan tahun 2019 menjadi 15,2 atau dengan katalain 1 guru mengajar 15 siswa SMA

Gambar 4.4. Rasio Guru & Murid SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

Rasio Guru/M urid janjang pendidikan SMP di provinsi Papua masih dalam batas ideal. Rasio guru/murid SMP pada tahun 2015 sabanyak 15,73 atau dengan kata lain 1 guru mengajar 16 siswa, kemudian meningkat menjadi 16,76 pada tahun 2017 sampaidengan tahun 2019 menjadi 15,85 atau dengan kata lain 1 guru mengajar 16 siswa SMP

Gambar 4.6. Rasio Guru & Murid SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi kasar SD di Provinsi Papua sebesar 0,25% satiap tahunnya. Angka partisipasi kasar sekolah dasardi provinsi papua terlihat mengalami fluktasi. Pada tahun 2015 angka partisipasi kasar sekolah dasar sebesar 95,15 persen, kemudian mengalami penurunandi tahun 2016 hingga 2017. Sempat kembali meningkat pada tahun 2018, namunmenurunlagi di tahun 2019 menjadi 91,94 persen.

Gambar 4.7. APK SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019

APK SD				
95,15	94,74	92,94	94,47	91,94
2015	2016	2017	2018	2019
		0,25%		
_	_		_	_

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi kasar SMP di Provinsi Papua sebesar 14,2% satiap tahunnya.

Angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama di provinsi papua terlihat mengalami fluktasi. Pada tahun 2015 angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama sebesar 73,59 persen, kemudian mengalami penurunandi tahun 2016. Sempat kembali meningkat pada tahun 2017 dan 2018, masing-masing menjadi 82,20 persen dan 87,81 persen namun menurun lagidi tahun 2019 menjadi 78,11 persen.

Gambar 4.8. APK SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019

APK SMP					
73,59	72,07	82,20	87,81	78,11	
		•		•	
2015	2016	2017	2018	2019	
		14,2%			

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi kasar SMA di Provinsi Papua sebesar 2,96% satiap tahunnya.

Angka partisipasi kasar sekolah menengahatas di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2015 angka partisipasi kasar sekolah menengahatas sebesar 66,97 persen, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 76,33 persen. Meskipun pada tahu 2018 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu ditahun 2017 sebesar 67,94 persen menurun menjadi 65,07 ditahun 2018

Gambar 4.9. APK SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019

	APK SMA				
66,97	66,85	67,94	65,07	-	
~	-		\	76,33	
2015	2016	2017	2018	2019	
		2,96%			
		2,30/0			



Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi murni SD di Provinsi Papua sebesar 0,17% satiap tahunnya. Angka partisipasi murni sekolah dasardi provinsi papua terlihat mengalami peningkatan yangcukupbaik. Pada tahun 2015 angka partisi pasi murni sekolah dasar sebesar 78,56 persen, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 79,19 persen.

Gambar 4.10. APM SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019

APM SD				
78,56	78,66	78,83	79,09	79 19
2015	2016	2017	2018	2019
		D 470/		
		0,17%		

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Gambar 4.11. APM SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi murni SMP di Provinsi Papua sebesar 0,70% satiap tahunnya. Angkapartisipasi murni sekolah menengah pertama di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2015 angka partisipasi murni sekolah menengah pertama sebesar 54,21 persen, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 57,19 persen.

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi murni SMA di Provinsi Papua sebesar 0,24% satiap tahunnya.

Angka partisipasi murni sekolah menengahatas di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2015 angka partisipasi murni sekolah menengahatas sebesar 43,22 persen, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 44,32 persen. Sekalipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 4,27 persen.

Gambar 4.12. APM SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019

	APM SMA					
43.22	4,27	43.48	44.31	44.32		
2015	2016	2017	2018	2019		
		0,24%				



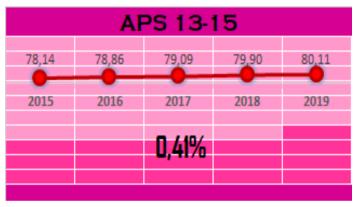
Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi sekolah usia 07-12 tahun di Provinsi Papua sebesar 0,39% satiap tahunnya. Angka partisipasi sekolahusia 07-12 tahun di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2015 angka partisipasi sekolahusia 07-12 tahun sebesar 81,04 persen, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 82,62 persen.

Gambar 4.13. APS 07-12 Provinsi Papua Tahun 2015-2019

APS 07-12					
81,04	81,11	81,80	82,38	82,62	
2015	2016	2017	2018	2019	
		0,39%			

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Gambar 4.14. APS 13-15 Provinsi Papua Tahun 2015-



sekolah usia 13-15 tahun di Provinsi Papua sebesar 0,41% satiap tahunnya. Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2015 angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun sebesar 78,14 persen, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 80,11 persen..

Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Rata-rata pertumbuhan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun di Provinsi Papua sebesar 0,10% satiap tahunnya. Angka partisipasi sekolahusia 16-18 tahun di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2015 angka partisipasi sekolahusia 16-18 tahun sebesar 61,96 persen, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 62,11 persen.

Gambar 4.15. APS 16-18 Provinsi Papua Tahun 2015-2019

APS 16-18					
61,96	62,07	63,35	63,46	62,11	
2015	2016	2017	2018	2019	
		0,10%			
		•			



Rata-rata angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar di Provinsi Papua sebesar 1% satiap tahunnya.

Angka putus sekolah jenjang pendidikansekolah dasar di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan namun tidak begitu signifikan.Pada tahun 2015 angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar sebesar 0,97 persen, meningkat hingga menjadi 2 persen pada tahun 2019. Sekalipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,59 persen.

Gambar 4.16. Angka Putus Sekolah SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Gambar 4.17. Angka Putus Sekolah SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019

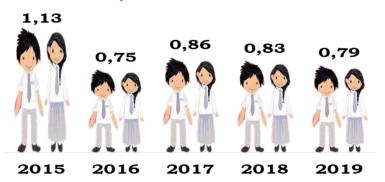


Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Rata-rata angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama di Provinsi Papua sebesar 1,44% satiap tahunnya. Angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan namun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2015 angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah pertama sebesar 1,08 persen, meningkat hingga menjadi 2,70 persen pada tahun 2019. Sekalipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,71 persen.

Rata-rata angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama di Provinsi Papua sebesar 0,87% satiap tahunnya. Angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atas di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan namuntidak begitu signifikan. Pada tahun 2015 angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atas sebesar 1,13 persen, mengalami penurunan hingga menjadi 0,79 persen pada tahun 2019.

Gambar 4.18. Angka Putus Sekolah SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019





Angka kelulusan jenjang pendidikan sekolah dasar di provinsi Papua mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Angka kelulusan jenjang pendidikansekolah dasar di provinsi papua terlihat mengalami penurunan, pada tahun 2015 angka kelulusan sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar sebesar 98,60 persen, mengalami penurunanhingga menjadi 73,07 persen pada tahun 2019.

Gambar 4.19. Angka Kelulusan SD Provinsi Papua Tahun 2015-2019

98,60 97,88 98,17

81,61

73,07

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Gambar 4.20. Angka Kelulusan SMP Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Angka kelulusan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di provinsi Papua mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Angka kelulusan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di provinsi papuaterlihatmengalami penurunan, pada tahun 2015 angka kelulusan sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah pertamasebesar 94,38 persen, mengalami penurunan hingga menjadi 59,31 persen pada tahun 2019.

Angka kelulusan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di provinsi Papua mengalami penurunan pada tahun 2018-2019.

Angka kelulusan jenjang pendidikansekolah menengah atas di provinsi papua terlihat mengalami penurunan, pada tahun 2015 angka kelulusan sekolah jenjangpendidikan sekolah menengah atas sebesar 98,12 persen, mengalami penurunan hingga menjadi 27,44 persen pada tahun 2019.

Gambar 4.21. Angka Kelulusan SMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019





89,09 88,15 85.00 84,43 98 2016 2017 2015 2018

Gambar 4.22. Angka Melanjutkan Sekolah Provinsi Papua Tahun 2015-2018



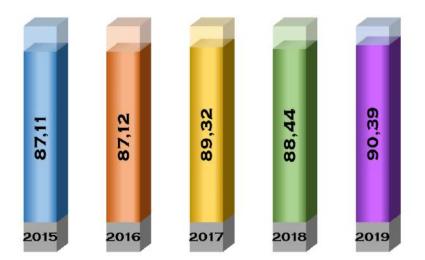


Sumber: pusdalisbang.papua.go.id

Angka melanjutkan sekolah jenjang pendidikan SMP ke Jenjang pendidikan SMAdi provinsi Papua mengalami penurunan pada tahun 2019. Angka melanjutkan sekolah jenjangpendidikan SDkejenjang pendidikan SMP di provinsi papua terlihat mengalami peningkatan, pada tahun 2015 angka melanjutkan sekolah keSMP sebesar 84,43 persen terus mengalami peningkatan hingga menjadi 89,09 persenpadatahun 2018. Sekalipun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 85 persen, namun bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan 0,57 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,19 persen per tahun. Sementara untukangka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SPM ke SMA di provinsi Papua mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 78,73 persen menurun pada tahun 2019 menjadi 74,24 persen. Sekalipun sempat mengalami peningkatanpada tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing sebesar 94,98 persen dan 94,77 persen.

Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di provinsi Papua mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di provinsi Papua terus mengalami peningkatan dari 87,11 persenpenduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf terus meningkat hingga 90,39 persenpenduduk yang melek huruf pada tahun 2019.

Gambar 4.23. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Provinsi Papua Tahun 2015-2019

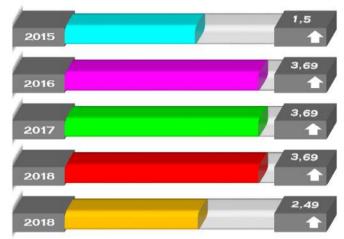


Sumber: pusdalisbang.papua.go.id

4.2. AKSES KESEHATAN

Akses kesehatan di Provinsi Papua mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Rasiopuskesmas per 10.000 penduduk di provinsi Papua pada tahun 2015 menunjukkan 3 puskes mas melayani 10.000 penduduk meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sebanyak 4 puskesmas melayani 10.000 penduduk. Namun sampai pada tahun 2019 rasio puskesmas mengalami penurunan, hal tersebut terindikasi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin tinggi sehingga pelayanan terhadap puskesmas juga semakin meningkat

Gambar 4.24. Rasio puskesmas per 10.000 penduduk Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Gambar 4.25. Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per 100ribu penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019



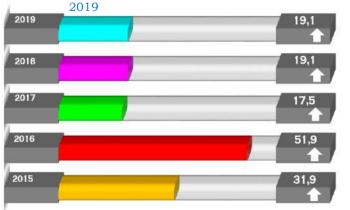
RASIO DOKTER PER 100 RIBU PENDUDUK RASIO TENAGA MEDIS PER 100 RIBU PENDUDUK

Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Rasio dokter per 100 ribu penduduk di Provinsi Papua penurunan pada tahun **2019.** pelayanan dokter terhadap 100 ribupenduduk. Juga terindikasi semakin mengalami penurunan. Provinsi Papua pada tahun 2015 menunjukkan 31 dokter dapat melayani 100 ribu penduduk dan terus menurun hingga tahun 2019 sebanyak 24 dokter melayani 100 ribu penduduk.

Masih rendahnya penanganan imunisasi dasar lengkap terhadap bayi di provinsi Papua. Penanganan imunisasi dasar lengkap terhadap bayi di desa/kelurahan yang berada di provinsi Papua belum begitu berjalan dengan baik. Terlihat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah desa/kelurahan yang melakukan imunisasi dasar lengkap terhadap bayi di provinsipapua belum 100 persen. Pada tahun 2015 sebesar 19,1 persen desa/kelurahan Universal Child Immunization higga tahun 2019barumencapai 31,9 persen.

Gambar 4.26. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Papua Tahun 2015-



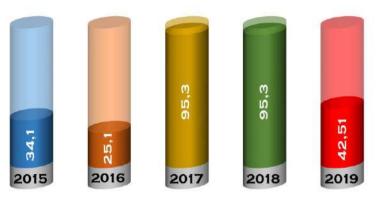
Sumber: komdat.kemkes.go.id



Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan vang memiliki kompetensi kebidanan di provinsi Papua mengalami penirunan yang cukup signifikan pada tahun 2019.

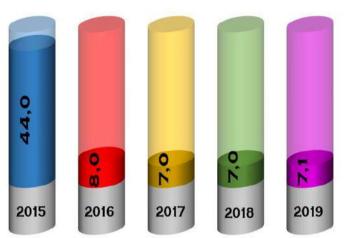
Terlihat sejak tahun 2016 pertolongan persalinan oleh tenaga kebidanan sebesar 25,1 persen kemudian meningkat pada tahun 2017 hingga tahun 2018 sebesar 95,3 persen dan 95,3 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 42,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 2016 dan 2019 tingginya cakupan pertolongan persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Gambar 4.27. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua (2020)

Gambar 4.28. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2019

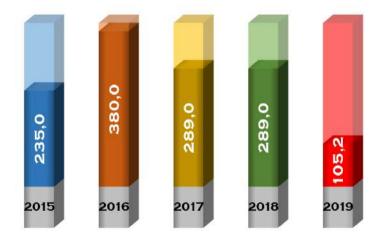


Angka kematian bayi di provinsi Papua terlihat terus mengalami penurunan. Terlihat masih terdapat kasus kematian bayi padaperiode 2015-2019, bahkan di tahun 2015 tercatat AKB tergolong sangat tinggi. Diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun cukup pesat hingga tahun 2019. Kasus AKB vang terjadi di Provinsi Papuamerupakanakumulasidari 29 kabupaten/kota yang tersebar di 5 wilayah adat. Tercatat pada tahun 2015 kasus AKBmencapai hingga 44 kasus AKB per 1000 kelahiran, kemudian turunditahun 2016 sebanyak 8 kasus, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 7 kasus per 1000 kelahiran.

Sumber: komdat.kemkes.go.id

Angka kematian ibu hamil diprovinsi Papua terlihat cenderung mengalami penurunan. Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkankarena kehamilannya atau pengelolaannya,danbukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll

Gambar 4.29. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2019

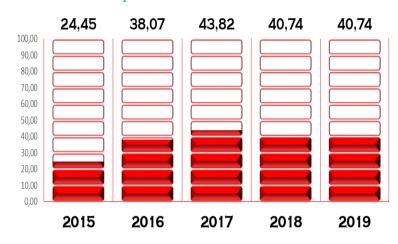


Sumber: komdat.kemkes.go.id



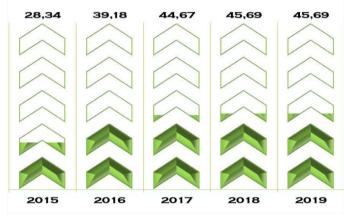
Cakupan kunjungan K4 di Provinsi Papua mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019. Cakupan kunjungan K4 merupakan indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat pemeriksaan yang didapatkan olehibusaat masa kehamilan. Terlihat sejak tahun 2015 cakupan kunjungan ibu hamil K4 di provinsi Papua mengalami peningkatan hinggatahun 2019. Namun angka tersebut masih tergolong rendah.

Gambar 4.30. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: komdat.kemkes.go.id

Gambar 4.31. Cakupan pelayanan nifas Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: Kemkes RI, 2020

Cakupan pelayanan nifas di Provinsi Papua mengalami peningkatan pada tahun 2015-

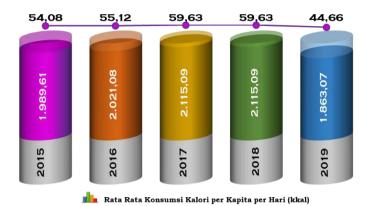
2019. Nifas adalah periode mulai 6 jamsampai dengan 42 hari pasca perselinan. Pelayanan nifas sesuai stansar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari. Pada minggu ke IV termas uk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan atau pemasangan KB pasca persalinan. Cakupan pelayanan nifas dihitung dengan cara, jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standart disatuwilayah pada kurun waktu tertentu dabagi seluruh ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama dan dikalikan seratus persen.

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Provinsi Papua Tahun 2015-2019 cenderung masih cukup rendah. Pada tahun 2015 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Provinsi Papua Tahun 2015-201 mencapai 27,91 Kkal/Kapita kemudianmeningkat pada tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 24,97 Kkal/Kapita/Hari

Gambar 4.32. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Gambar 4.33. Rata Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari (kkal) dan Protein per Kapita per Hari (garam) Provinsi Papua Tahun 2015-2019



— 🖟 Rata Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari (garam)

Sumber: BPS RI, 2020

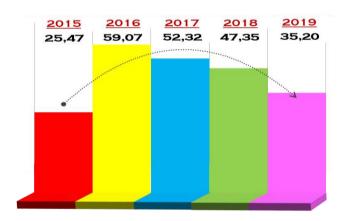
Angka Penderita malaria di provinsi Papua masih cukup tinggi. Pada tahun 2015 tercatatkasus penderita penyakit malaria mencapai 25 kasus per 1.000 penduduk, dan terjadi peningkatan. Di tahun 2016 yang cukup tinggi yaitu. Sebanyak 59 kasus per. 1.000 penduduk. Meskipun demikian, angka penderita sepanjang tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Tercatat sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 35 kasus/1.000 penduduk yang masih lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya.

Asupan kalori Provinsi Papua dalam rentang waktu 5 tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2019.

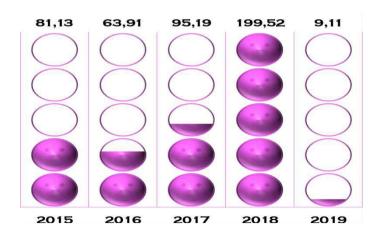
Konsumi kalori atau protein adalahbanyaknyakaloriatau protein yang benar-benar dikonsumsi per orangperhari. Rata-rata wanita memerlukan asupan sebanyak 2000 kalori per harinya, sedangkan pria rata-rata membutuhkan asupan sebanyak 2500 kalori per hari. Pada tahun 2015 asupan kalori mencapai 1.990 kkal/kapita/hari dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2018 menjadi 2.115 kkal/kapita/hari, namun terjadi penurunan di tahun 2019 sebesar 279 poin menjadi 1.863 kkal/kapita/hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa asupan kaloridi Provinsi Papua belum memenuhi standar yang ditentukan.

Sumber: komdat.kemkes.go.id

Gambar 3.34. Angka penderita Malaria Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Gambar 4.35. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: komdat.kemkes.go.id

Tingkat prevalensi tuber kolosis per 100 ribu penduduk diprovinsi Papua mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 81,13 kasus, dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2018 yaitusebesar 199,52 kasus per. 1.00 ribu penduduk. Meskipun demikian, angka penderita sepanjang tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Tercatat sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 9,11 kasus/1.00 ribu penduduk yang masih lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya.

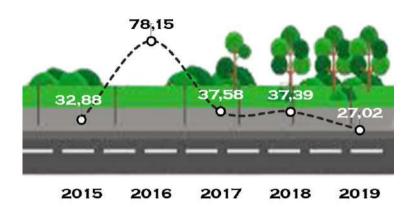


4.3. INFRASTRUKTUR

Proporsi jalan dalam kondisi baik di provisi Papua cenderung mengalami

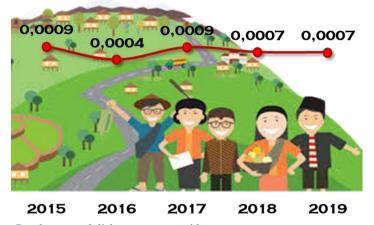
penurunan. Kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik diprovinsi Papua pada tahun 2015 sebesar 32,88 persen dan mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2016 menjadi 78,15 persen. Namun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 proporsijaringnjalan dalam kondisi baik merosot hingga 27,02 persen, yang artinya terdapat 72,98 persen kondisi jalan dalam keadaan yang belum di lakukan peningkatan.

Gambar 4.36. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: pusdalisbang.papua.go.id

Gambar 4.37. Rasio panjang ialan dengan iumlah penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: pusdalisbang.papua.go.id

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di provinsi Papua tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan jalan dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan,padatahun 2015 dengan panjang jalan 4 km melayani 10 ribu penduduk namun sempat menurun pada tahun 2019 menjadi 4 km melayani 10 ribu penduduk dan kembali meningkat pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 hingga tahun 2019 kembali menurun menjadi 7 km melayani 10 ribu penduduk. Hal tersebutmengindikasikan bertambahnya jumlah penduduk di privinsi papua setiap tahun namun panjang jalan diprovinsi papua tidak mengalami peningkatan signifikan.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebanyak 27,10 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 38,27 persen. Namun angkaini masih sangat rendah, dengan kata lain masih terdapat sekitar 61,73 persen rumah tangga yang belum mandapatkan akses berkelanjutan terhadapair minum layak di provinsi Papua.

Gambar 4.38. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum 50,00 layak Provinsi Papua Tahun 2015-2019 45,00 38,27 40.00 33,75 32,56 35,00 30,97 30,00 27,10 25.00 20,00 15.00 10.00 5,00 0,00 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: BPS RI





Gambar 4.39. Persentase penduduk berakses air minum Provinsi Papua Tahun

Sumber: BPS RI

Proporsi rumah tangga berakses air minum di provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 proporsi rumah tangga dengan berakses air minumsebanyak51,27 persenmengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 60,85 persen.



Gambar 4.40. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua cenderung terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai -3,94% pertahun. Tercatat sampai dengan tahun 2019 rasio tempat i badah per 10.000 penduduk adalah sebesar 21 unit. Artinya untuk 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 21 unit tempat ibadah

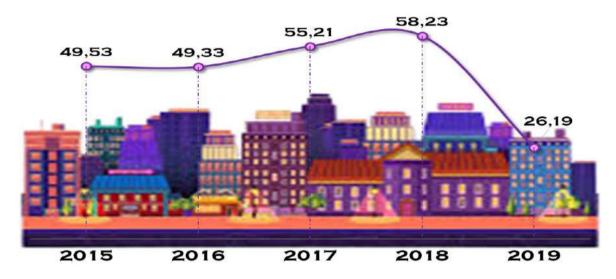


4.4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Akses kepemilikan rumah di Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan.

Hal tersebut dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yanglayakdanterjangkau tercatat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 akses terhadap rumah layakhuniadalah sebesar. 49,53 persenturun sebanyak -23,34 poin menjadi 26,19 persen di tahun 2019. Meskipun selama ini pemerintah telah berupaya dalam memberikan program perumahan bagi masyarakat kurang mampu, namun ketersediaan tersebut masih belummampu meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh fasilitas rumah layak huni dan terjangkau.

Gambar 4.41. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Papua (2020)

Jumlah rumah layak huni di provinsi Papua mengalami peningkatan yang positif. Padatahun 2015 jumlah rumah layak huni yang terbangun sebanyak 8.089 unit yang terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 13.685 unit rumah layak huni yang terbangun.

Gambar 4.42. Jumlah rumah layak huni Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Papua (2020)

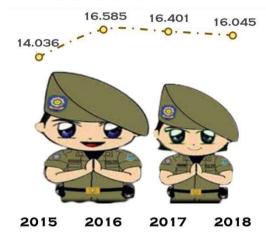


4.5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, & PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat selamatahun 2015-2017 terus ditingkatkan.

Perlindungan masyarakat merupakanbagianyang tidak terpisahkan dari ketentramandanketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penangangan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terlihat sejak tahun 2015 jumlah anggota linman terus meningkat hingga tahun 2019.

Gambar 4.43. Jumlah Anggota Linmas Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Papua (2020)

4.6. SOSIAL

Gambar 4.44. Jumlah Fakir Miskin Provinsi Papua Tahun 2015-2017



Jumlah fakir miskin di provinsi Papua masih tergolong tinggi. Jumlah fakirmiskindi provinsi Papua yang tercatat selama tiga tahun terakhir terlihat masih cukup tinggi. Padatahun 2015 jumlah fakir miskin di provinsi papua sebanyak 432.640 jiwa dan hanya berkurang sebanyak 500 jiwa di tahun 2017 menjadi 437.140 jiwa.

Sumber: Bappeda Papua (2018)

Jumlah anak terlantar di provinsi papua mengalami peningkatan. Jumlah anak terlantar di provinsi Papua yang tercatat sejak tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah anak terlantar di provinsi Papua sebanyak 344 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 510 jiwa.

Gambar 4.45. Jumlah Anak Terlantar Provinsi Papua Tahun 2015-2017



2015

2016

2017



Sementara jumlah lanjut usia terlantar di provinsi papua mengalami penurunan 20 jiwa. Jumlah lanjut usia terlantar di provinsi Papua yang tercatat sejak tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah lanjut usia terlantar di provinsi Papua sebanyak 217 jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 220 jiwa, kemudia berkurang 20 jiwa menjadi 200 jiwa pada tahun 2017.

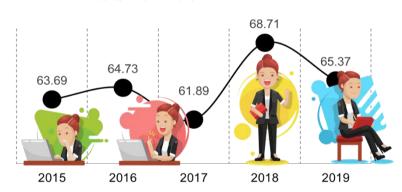
Gambar 4.46. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Provinsi Papua Tahun 2015-2017



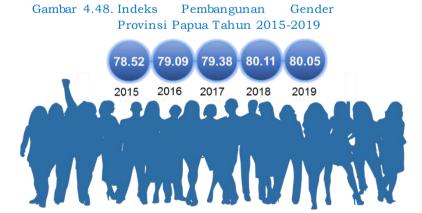
4.7. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER

Indek Pemberdayaan Gender di Provinsi Papua sangat fluktuatif. Sepanjang tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan, dengan angkatertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 68,71 poin.

Gambar 4.47. Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)



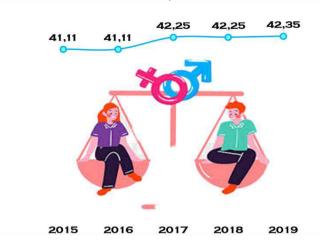
Indek Pembangunan Gender Di Provinsi Papua mengalami peningkatan yang positif. Indeks Pembangunan gender (IPG) yang dihitung dengan menggunakan harapan hidup, harapan pendidikan dan indeks disribusi pendapatan merupakan indeks kemampuan pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketidakadilan pencapaian laki-laki danperempuan. Terlihat pada tahun 2015 indeks pembangunan gender di provinsi papua sebesar 78,53 persenyang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 91,07 persen.

Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)



Meskipun peningkatannya belum begitu signifikan. namun terlihat partisipasi perempuan terlihat sudah tinggi. Membangun daerah tidak terlepas dari tiga pilar utamayaitupemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Strategi pembangunan selama ini sudah diarahkan dalam memberdayakan masyarakat secara umum dan peningkatan peran swasta terhadap urusan-urusan masyarakat yang belum optimal dilakukan pemerintah daerah. Peran lembaga swasta dalam menyerap lapangan tenaga kerja perempuan di Provinsi Papua selama ini terbilang cukup tinggi.. Sampai dengan tahun 2019 partisipasi perempuan pada sektor swasta mencapai 42,35%.

Gambar 4.49. Pertisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Provinsi Papua Tahun 2015-2019

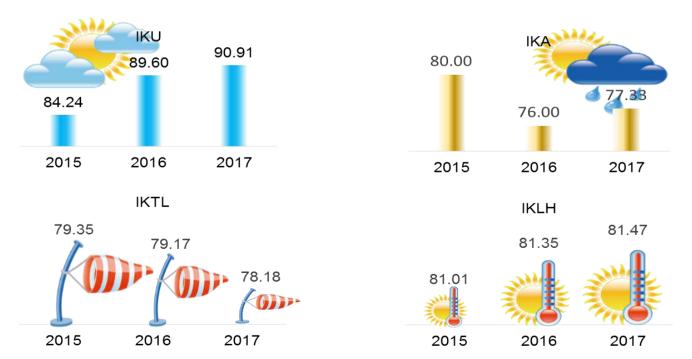


Sumber: BPS Papua (2020)

4.8. UNGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua memiliki trend dengan pertumbuhan yang positif. Sementara satu dari tiga indikator pembentuk IKLH Provinsi papua yaitu IKU memiliki pertumbuhanyang positif dan cenderung meningkat. Sedangkan dua indikator lainnya seperti IKA dan IKTL memiliki pertumbuhan yang cenderung negatif. Sampai dengan tahun 2017 tercatat IKLH Provinsi Papua adalah 81,47 poin.

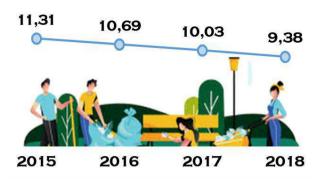
Gambar 4.50. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2017



Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (2017)



Gambar 4.51. Persentase Sampah Yang Terangkut Ke TPA Tahun 2015-2018



Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Gambar 4.52. Persentase Sampah Yang Tidak Terolah Tahun 2015-2018

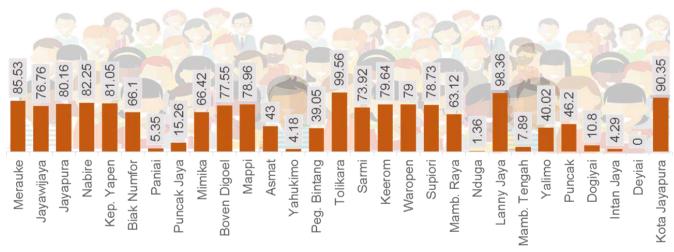


Masih rendahnya implementasi dari 3R (Reuse, Recycle dan Reduce) terhadap sumbersampah baik di sumber maupun di tempat pengumpulan sampah menjadi salah satu indikasi pengelolaan sampah yang belum baik. Di samping itu terbatasnya sarana persampahan di masing-masingdistrikmenjadisalah satu kendala yang cukup besar. Provinsi Papua mengalami tren penurunan keterangkutan sampah keTPAdari tahun 2015 yang semula sebesar 11,31% menjadi 9,38% pada tahun 2018. Hal tersebut meningkatkan sampah domestikdari 76,15% pada tahun 2015 menjadi 80,42% pada tahun 2018

4.9. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sampai dengan tahun 2019, tercatat persentase penduduk yang memiliki KTP adalah sebesar 58,52%, yang artinya masih terdapat 41,48% penduduk belum memiliki KTP. Sampai dengan tahun 2019 juga tercatat beberapa daerah dengan kepemilikan KTP terbilangsangatrendah diantaranya adalah kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Mamberamo Tengah, Dogiyai, Intan Jayadan Deiyai. Apabila dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua tercatat sebanyak 2 (dua) wilayahyang memiliki persentase penduduk memiliki NIK dibawah 50% yaitu, Mee Pago dan La Pago. Sementara beberapa kabupaten dengan persentase penduduk dananak yang memiliki NIK yang paling tinggi adalah kabupaten Tolikara dengan jumlah 99,56 persen diikuti kabupaten Lannyjaya sebesar 98,36 persen diikuti Kota Jayapura sebesar 90,35 persen.

Gambar 4.53. Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki NIK Di Provinsi Papua Tahun 2019

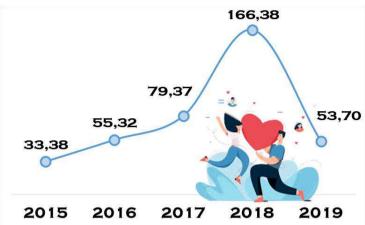


Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)



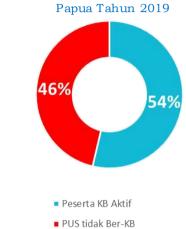
4.10. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Gambar 4.54. Rasio Akseptor KB Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber: BPS Papua (2020)

Gambar 4.55. Pasangan Usia Subur Ber-KB Aktif dan Tidak Aktif Provinsi



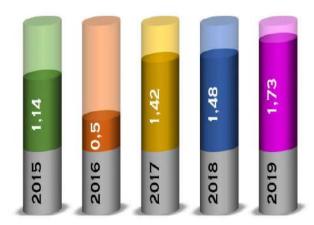
Sumber: BPS Papua (2020)

Rasio akseptor KB di provinsi Papua cenderung meningkat. Persentase pasanganusiasubur (PUS) dalam menyukseskan program keluarga berencana dapat terdeteksi melalui partisipasinya menjadi akseptor KB. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran PUS selain bersumber dari kesadarannya sendiri jugadi pengaruhi oleh kemampuan layanan pemerintah khususnya para aparatur yang berperan di dalam pelaksanaan program tersebut.

4.11. KOPERASI

Persentase koperasi aktir di provinsi Papua cenderung meningkat. Pada tahun 2015 persentase koperasi aktif di provinsi papua sebesar 1,14 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,5 persen dan kembali meningkat menjadi pada tahun 2017 hingga tahun 2019 menjadi 1,73 persen.

Gambar 4.56. Persentase Koperasi Aktif Provinsi Papua Tahun 2019



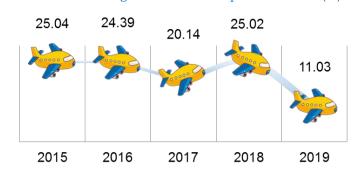
Sumber: BPS Papua (2020)





Perekonomian Papua sangat terbuka dengan negara lain. Kondisi ini digambarkan dengan tingginya rasio ekspor dan impor luar negeri terhadap PDRB yang lebih dari 20% per tahun, terutama pada tahun 2015-2018.

Gambar 5.1. Derajad Keterbukaan Ekonomi Luar Negeri Di Provinsi Papua 2015-2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 5.2. Pertumbuhan Ekspor Non Migas Bulanan y.o.y Provinsi Papua Tahun 2019-2020 (%)

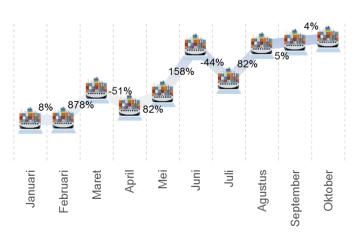


Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)

Pertumbuhan ekpor non migas bulanan y.o.y Provinsi Papua sangat fluktuatif. Sebagai misal untuk tahun 2019-2020, sepanjang bulan Januari-April rata-rata menurun -76% per bulan. Sedangkan di bulan Mei-Oktober mengalami peningkatan yang sangat mencolok sekitar 988% per bulan. Jika dilihat secara kes el uruhan terindikasi ekspor non migas Papua cenderung naik 14,39% di tahun 2020 (sampai bulan Oktober) dibandingkan tahun 2019.

Nilai ekspor non migas bulanan m.o.m Provinsi Papua selama tahun 2020 meningkat sangat singnifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020 yaitu sebesar 878% dibandingkan Januari 2020, serta di bulan Juni 2020 sebesar 158%. Rata-rata selama periode Januari-Oktober 2020 nilaiekspornonmigas Papua meningkat sekitar 124% per bulan.

Gambar 5.3. Pertumbuhan Migas Ekspor Non Bulanan m.o.m Provinsi Papua Tahun 2020 (%)

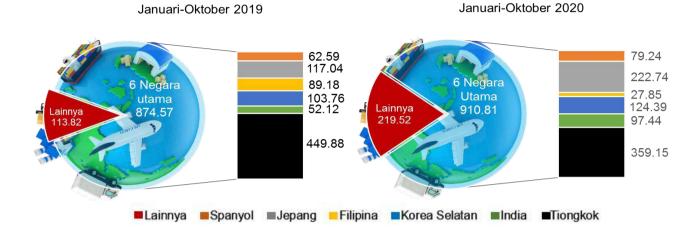


Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)



Terdapat 6 negara utama yang menjadi pangsa terbesar ekpor non migas Papua. Ke-6 negara yang dimaksud adalah Tiongkok, India, Korea Selatan, Filipina, Jepang dan Spanyol. Rata-rata total kontribusinggara-negara tersebut sebesar US\$ 1059,36 juta (84,53%) per tahun selama periode 2019-2020. Dipastikan dinamika ekonomi ke-6 negara ini mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan ekonomi wilayah Papua.

Gambar 5.4. Komposisi Ekspor Menurut Negara Tujuan Di Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (juta US\$)



5.2. PERDAGANGAN ANTARDAERAH

Perkembangan neraca perdagangan antardaerah Provinsi Papua selalu mengalami defisit yang cenderung terus meningkat. Fenomena ini tercermin padatahun 2019 dimana defisitnya bertambah sekitar Rp. -1,469,425 juta dibandingkan tahun 2018. Tercatat di tahun 2019 nilai pembelian meningkat 67,63%, sedangkan nilai penjualan menurun sebesar -46,42%.

Gambar 5.5. Perkembangan Perdagangan Antaradaerah Provinsi Papua Tahun 2018-2019

Komponen	20	2018 2019		019	Perubahan 2018-2019		
Perdagangan Antarwilayah	Nilai (rp juta)	Volume (kg)	Nilai (rp juta)	Volume (kg)	Nilai (%)	Volume (%)	
Pembelian	1,334,778	27,988,648	2,237,434	160,183,399	67.63	472.32	
Penjualan	412,396	6,670,688	220,966	3,629,545	46.42	45.59	
Neraca Perdagangan	-922,382	-21,317,960	-2,016,468	-156,553,854			

Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

Gambar 5.6. Struktur Komoditi Perdagangan Antaradaerah Provinsi Papua Tahun 2019 (%)

Komoditi	Pembelian	Penjualan
Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	15.12)) = :
Industri kendaraan bermotor roda dua, empat atau lebih	26.48)) = (
Industri alat angkutan lainnya	17.12	
Kelompok lainnya	41.28	112
Pertambangan bijih, logam mulia	C. Office and the second	0.12
Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan. Bambu	A MARIE A	93.31
Pengusahaan hutan	-	6.57
Total	100.00	100.00

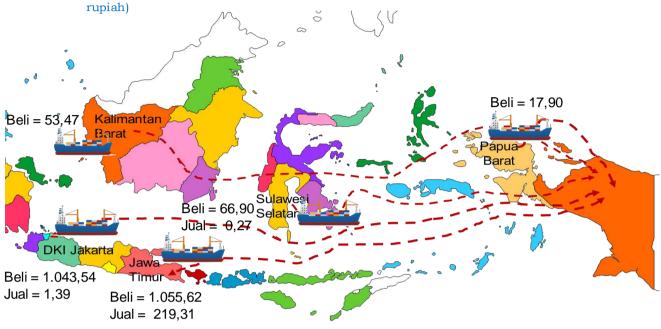
Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

Hasil industri kendaraan bermotor dan industri pengolahan kayu menguasai pangsa perdagangan antardaerah Papua selama ini. Untuk tahun 2019 misalkan, kontribusi industri kendaraan bermotor sekitar 26,48% dalam struktur pembelian antardaerah Papua, sedangkan industri pengolahan kayu menguasai 93,31% komposisi penjualan antardaerah Papua.



Terdapat 5 provinsi asal pembelian dan tujuan pembelian yang paling besar dalam struktur perdagangan antardaerah Papua. Terbesar adalah Provinsi Jawa Timur, DKI Jakartadan Sulawesi Selatan, ketiganya tercatat di tahun 2019 melalukan transaksi (pembelian dan penjualan) dengan Papua senilai Rp. 2.379.777 juta.

Gambar 5.7. Lima Provinsi Asal Pembelian dan Tujuan Penjualan Terbesar Provinsi Papua Tahun 2019 (milyar



Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

5.3. CAPITAL INFLOW

Nilai investasi di Papua yang difasilitasi oleh PM DN cenderung mengalami kontraksi, sementara melalui PM A terlihat cukup ekspansif. Seperti yang tercermin pada tahun 2015-2019, rata-rata nilai PMDN Provinsi Papua mengalami kontraksi sekitar -18,32% per tahun sehingga pada tahun 2019 tercatat nilai PMDNmenjadi Rp. 567,79 milyar. Disisi lain, nilai PMA relatif ekspansif sekitar 1,20% per tahun, dengannilai PMA sebesar US\$941 juta di tahun 2019. Peran Provinsi Papua dalam pangsa PMDN di Indonesia sangat rendah, hanya 0,29% pertahun selama periode 2015-2019. Sedangkan pada struktur PMA terlihat cukup besar sekitar 4,05% per tahun.

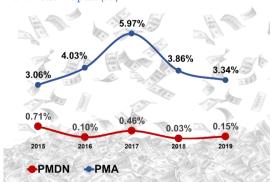
Gambar 5.8. Nilai Investasi Dan Kontribusi Provinsi Papua Dalam Komposisi Penanaman Modal Indonesia Tahun 2015-2019

Nilai Penanaman Modal Papua Dan Indonesia

Investasi/Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	
PMDN (milyar rupiah)						
Papua	1,275.20	220.50	1,217.90	104.60	567.70	
Indonesia	179,465.90	216,230.80	262,350.50	328,604.90	386,498.40	
PMA (juta US\$)						
Papua	897.00	1,168.40	1,924.10	1,132.30	941.00	
Indonesia	29,275.90	28,964.10	32,239.80	29,307.90	28,208.80	

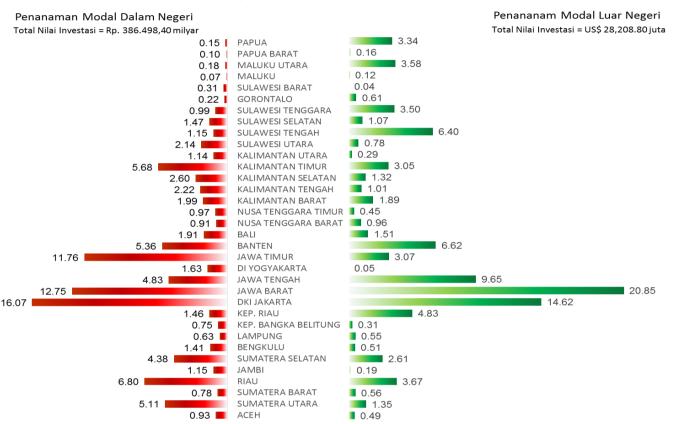
Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

Kontribusi Papua (%)





Gambar 5.9. Perbandingan Andil Provinsi Papua Dengan Daerah Lainnya Dalam Struktur Penanaman Modal Indonesia Tahun 2019 (%)



Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

5.4. INDIKATOR MAKROEKONOMI PAPUA 2020

Jika menyertakan sektor tambang, PDRB Provinsi Papua tampak mengalami pertumbuhan yang positip sepanjang tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan PDRB dari Triwulan Is/d Triwulan III mencapai 4,66% per triwulan (q.o.q), dengan kenaikan tertinggi di Triwulan IIIsebesar6,09% sehingga nilai PDRB Papua bisa mencapai Rp. 35,31 triliun.

Red: PDRB tanpa tambang mengalami kontraksi rata-rata sekitar -0,24% per triwulan (q.o.q)



Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)

Berdasarkan PDRB pengeluaran dari Triwulan I s/d III hanya komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga yang mengalami kontraksi. Indikatornya terlihat dari rata-rata pertumbuhannyapertriwulan yang turun sebesar -2,43%. Sedangkan komponen Pertambahan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Luar Negeri tampak jelas tumbuh positip, dimana yang paling ekspansif adalah komponenekspormencapai 103,14% per triwulan (q.o.q) yang didominasi oleh ekspor tambang bijih tembaga dan emas.

Gambar 5.11. Tiga Komponen Pengeluaran Terbesar Pembentuk PDRB Provinsi Papua Tahun 2020 (triliun rupiah)



Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)

Terdapat 5 sektor besar yang menjadi pondasi ekonomi Papua selama tahun 2020, dimana 2 diantaranya mengalami pertumbuhan yang negatif. Sektor yang dimaksud adalah pertanian, kehutanandan perikanan yang mengalami penurunan sekitar -0,33% per triwulan (q.o.q), serta sektor perdaganganyang menurun ratarata -1,52% per triwulan (q.o.q). Sementara 3 sektor yang lain semua mengalami pertumbuhan positip, yang paling tinggi sektor pertambangan (16,53%), kemudian sektor pemerintahan (4,34%), dan sektor kontruksi (3,85%).

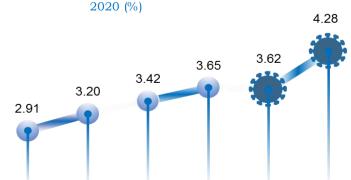
Gambar 5.12. Lima Sektor Terbesar Dalam Komposisi PDRB Provinsi Papua Tahun 2020 (triliun rupiah)



Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Papua pada tahun 2020 tercatat tinggi. Sampai dengan bulan Agustus 2020 angkanya mencapai 4,28% atau naik sebesar0,66% dari bulan Februari 2020, sebagai dampak dari Pandemik Covid-19. Menurut BRS Tenaga Kerja (BPS Papua, 2020), pada Agustus 2020, ada sekitar 229.617 orang atau sebanyak 9,38% dari total penduduk usia kerja yang terdampak pandemik Covid-19. Disini sekitar 2.529 orang menjadi pengangguran, 1.935 orang menjadi bukanangkatan kerja, 8.559 orang sementara tidak bekerja, dan 216.594 orang mengalami pengurangan jam kerja.

Gambar 5.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Papua Periode Februari 2018 – Agustus



Feb-2018 Ags-2018 Feb-2019 Ags-2019 Feb-2020 Ags-2020

Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)



Gambar 5.14. Tingkat Inflasi Bulanan Provinsi Papua Tahun 2020 (%)



Sumber: BPS Papua, 2020 (data diolah)

Efek *imported inflation* di Papua selama tahun 2020 kurang terlihat signifikan

Hal ini karena sepanjang bulan Januari sampai dengan November 2020 inflasi bulanan diProvinsi Papua selalu rendah dibawah 1% dengan rata-rata 0,21% per bulan (*m.o.m*). Bahkan untuk 4 bulan tertentu sempat mengalami deflasi, yang terbesar pada bulan Maret (-0,92%) dan Oktober (-0,79%). Sehingga dimungkinan tingkat inflasi Papua di tahun 2020 akan bergerak diantara 2,5 – 3,5 % (*y.o.y*).

5.5. FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kondisi perekonomian Papua yang sangat terbuka, dipastikan secara eksternal sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang terjadi pada setiap negara mitra dagang. Dalamhalini, berdasarkan kecenderungan ekspor luar negeri selama tahun 2020 terdapat 5 negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Papua yangdapat mempengaruhi perekonomian domestik dimasa mendatang, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, India, Filipina dan Korea Selatan. Berikut ini disampai kan perkiraan kondisi perekonomian dari negara -negara mitra dagangtersebutuntuk 1-2 tahun mendatang.



REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. Di tahun 2020, di mana negara-negara di dunia banyakyang mengalami resesi dengan pertumbuhan negatif, namun di RRT terjadi pemulihanekonomi dengan cepat dan di perkirakan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yangpositifsebesar 1,9%. Dalam proyeksi tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi RRT melejithingga 6% pada 2021, namun turun menjadi 2,6% di tahun 2022 (IMF, 2020).





JEPANG. Tahun 2020, Pertumbuhan Jepang diproyeksikan moderat menjadi 0,5%, dan untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jepang diprediksi akanmeningkatmenjadi 1,5% (IMF, 2020).





INDIA. Dalam Prospek Ekonomi Dunia tahunannya, IMF (2020) telah menurunkan pertumbuhan India untuk tahun fiskal 2020 menjadi minus 10,3%.IMFmenyebut,ekonomi India kemungkinan akan bangkit kembali dengan tingkat pertumbuhan 8,8% ditahun 2021.





FILIPINA. Negara Filipina juga terlihat mengalami resesi akibat dampak covid-19. Pemerintah filipina sendiri memprediksi pertumbuhan ekonominyaakanmerosothingga-5,5% sepanjang tahun 2020, yang mana angka ini lebih rendah dari yang diprediksi sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkisar 2,0% sampai 3,4%. Tahun 2021 perekonomian Filiphina diprediksi akan bisa mencapai 7,6% di tahun 2021 dan 6,4% di tahun 2022 (IMF, 2020).





KOREA SELATAN. OECD (2020) dalam laporannya memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di tahun 2020 terkontraksi menjadi -1,0% sedangkan di tahun 2021akan meningkat kinerja perekonomian Korea Selatan menjadi 3,0%.





Selain secara eksternal, perekonomian domestik Papua juga sangat dipengaruhi oleh faktorfaktor internal kondisi ekonomi nasional, baik itu melalui perdagangan antardaerah maupun aliran investasi PM DN. Oleh karena itu dinamika perekonomian nasional dimasa mendatang dipastikan akan mempengaruhi prospek perekonomian Papua untuk 1-2 tahun kedepan. Terkait dengan argumentasi tersebut, berikutini dipaparkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021, dan prospeknya di tahun 2021 dan 2022.



MENKEU RI. Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2020 minus 2,4 persen. Angka ini lebih rendah dari proyeksi awal sebesar -1,1 persen dan +0,2 persen. Penyebabnya, kasus Covid-19 kembali melonjak, sehingga masyarakat enggan beraktivitas (inews.id, 2020)



RAPBN 2021. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 4,5% hingga 5,5% pada 2021 yang ditopangoleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Perkiraan itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang telah disampaikan oleh presiden kepada DPR RI.

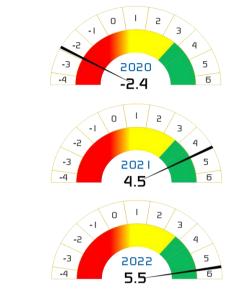


BANK DUNIA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8% pada 2021 atau perlahan-lahan pulih setelah diperkirakan tumbuh hanya 0% pada 2020, dan melesat hingga 6% pada 2022 (databoks.katadata.co.id, 2020).



BKF KEMENKEU RI. Kepala BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kemenkeu RI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesiadi tahun 2021 berada dalam rentang 3,0 - 4,4%, dan di tahun 2022 sebesar 5,1% (BKF Kemenkeu RI, 2020).

Gambar 5.15. Proveksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020, 2021 dan 2022 (%)



Sumber: Kemenkeu RI dan World Bank, 2020 (data diolah)

5.6. PROYEKSI EKONOMI PAPUA 2021 DAN 2022

Secara makro, proyeksi ekonomi Papua dapat ditinjau dari sisi aggregate demand dan aggregate supply. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini dipaparkan beberapa asumsiyangmenjadidasarproyeksi ekonomi Papua untuk tahun 2021 dan 2022.



Dari sisi aggregate demand, perekonomian Papua masih akan ditopang oleh ekspor komoditas non migas yaitu dari sektor pertambangan dan penggalian. Di tahun 2020,kinerja sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Papua relatif tidak terpengaruholeh Pandemik Covid-19, disaatsektor lainnya mengalami kontraksi. Diperkirakan dengan adanya pemulihan ekonomidinegaratujuan (RRT,India,Filipina, Jepang dan Korea Selatan) maka ekspor Papua masih akan mengalami pertumbuhan positifwalaumelambat. Kinerja perekonomian Papua tahun 2021 dan 2020 akan berpotensi positif dikarenakan meningkatnya kinerja pertambangan dengan dibukanya pertambangan bawah tanah sehingga meningkatkan produktifitas tambang dengan produksi tembaga dan emas yang berkualitas dibanding dengan tambang terbuka.



Selain ekspor, peranan konsumsi rumahtangga juga sangat dominan pada pertumbuhan ekonomi Papua. Sehingga dengan terjadinya pemulihan aktivitas ekonomi di akhir tahun 2020 akansemakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang berdampak terhadap peningkatankonsumsirumahtanggadan semakin membaiknya iklim usaha di Papua di tahun 2021, yang berlanjut ke tahun 2022 lebih nornal. Faktor perdagangan antardaerah yang semakin membaik dan bertambah pulih setelah diterpa Pandemik Covid -19 di Indonesia turut mengakselerasi peningkatan konsumsi rumahtangga di Papua pada tahun 2021 dan 2022.





Pelaksanaan PON XX Papua akan memberi efek multiplier yang sangat besar bagi perekonomian domestik baik itu peningkatan pada aggregate demand maupun supply.

Moment PON XX tahun 2021 tersebut dapat mendorong aktivitas produksi di Papua yang telahmelambat ditahun sebel umnya, khususnya pada sektor transportasi, akomodasi dan penyediaanmakanminum, pariwisata, pertanian, industri, kontruksi, dan beberapa sektor utili tas lainnya seperti produksiairdanlistrik. Kondisiini diperkirakanakan berjaan sampai akhir tahun 2021, yang kemudian memberi dampak simultan danakselerasi pertumbuhan ditahun 2022. Selain itu, dari sisi aqqreqate demand juga dapat mendorong kenaikan pengeluaran pemerintahyangakan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Papua baik itu di tahun 2021 maupun 2022 melalui belanja barangdanjasa, serta modal terkait dengan penyelenggaraan PON XX Papua.

Berdasarkan asumsi-asumsi makroekonomi di atas, serta mengacu pada kerangka logis adanya dampaksimultanantar variabel ekonomi, maka berikutini dapat disampaikan hasil proyeksi perekonomian Papuaditahun 2021 dan 2022, terutama untuk variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB dengan tambang dan tanpa tambang), inflasi, tingkat pengangguran, rasio penduduk bekerja dan ketimpangan pendapatan.

Gambar 5.16. Tabel Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Papua Tahun 2021 dan 2022 (%)

Indikator Ekonomi	2019	Perkiraan	Proyeksi		RPJMD Papua 2019-2023	
		2020	2021	2022	2021	2022
Pertumbuhan PDRB DT	-15.72	4.40	4.74	5.64	5.91	6.26
Pertumbuhan PDRB TT	5.03	-0.65	3.12	4.05	6.53	6.96
Laju Inflasi	2.34	3.28	3.64	2.86	2.34	2.3
Gini Ratio	0.36	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39
Rasio penduduk bekerja	96.35	95.72	96.15	96.40	97.68	97.84
TPT	3.65	4.28	3.85	3.60	2.32	2.16

Sumber: data diolah (2020)



